

Derailers' Guide to the WTO and Free Trade Regime **2.0**

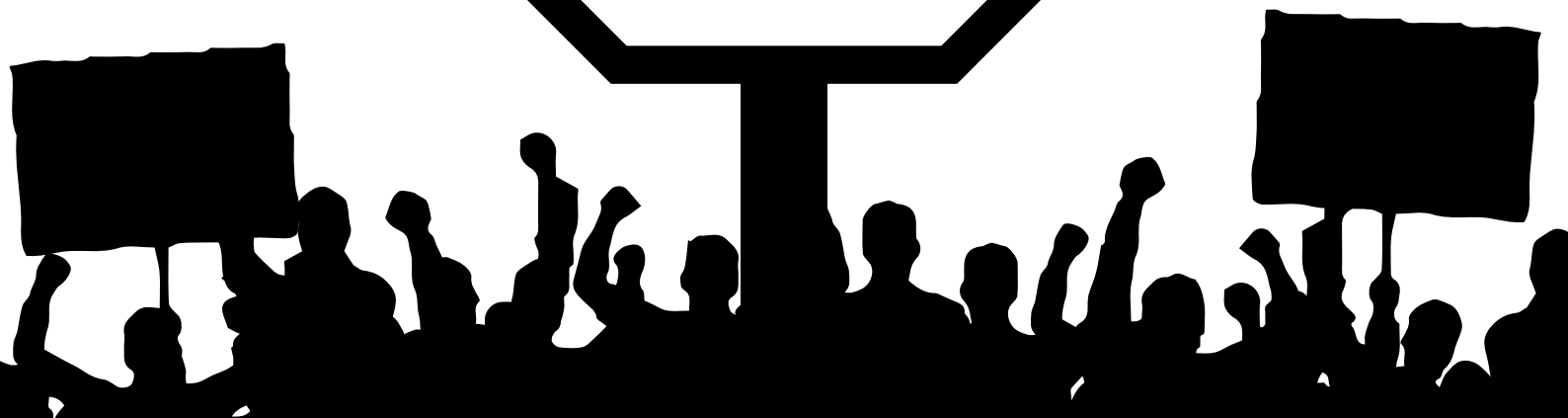
Pedoman Penggulingan:
WTO dan Rezim Perdagangan Bebas





Derailers' Guide **to the WTO and Free** **Trade Regime**

Pedoman Penggulingan:
WTO dan Rezim Perdagangan Bebas



Diterbitkan oleh
Focus on the Global South;
didukung oleh 11.11.11

CUSRI 4th Floor Wisit Prachuabmoh Building
Chulalongkorn University
Phayathai Road, Bangkok
THAILAND
+66 2 2187363-65

#19 Maginhawa Street, UP Village
Diliman, Quezon City, 1011
PHILIPPINES
+63 2 433-1676

33-D, Vijay Mandal Enclave
Near Kalu Sarai market
Hauz Khas, New Delhi
INDIA
+91 11 26563588

Focus menganggap bahwa isi dari publikasi ini adalah milik bersama dan masyarakat umum untuk menggunakan dan membagikan kutipan-kutipan ini khususnya untuk keperluan kampanye dan lainnya bagi organisasi sipil dan gerakan sosial. Pemberitahuan dan/ atau penyebaran sangat di hargai.

Tim Editorial:

Trisha Agarwala
Dorothy Guerrero
Shalmali Guttal
Afsar Jafri
Mary Ann Manahan
Clarissa Militante
Joseph Purugganan
Pablo Solon

Ilustrasi: Junggoi Peralta

Layout dan design: Amy Tejada

Daftar Isi

- 1** Pengantar
- 3** Sebuah Pohon Lahir Bengkok Tidak akan Pernah Lurus Batangnya:
Mengapa WTO Tidak Dapat Dirubah oleh Siapapun
- 7** Beberapa Fakta Mengenai WTO
Mengapa WTO Tidak Bisa Berubah Haluan
- 8** Putaran-Pembangunan Doha:
Kebuntuan antara Persaingan dan Bertahan hidup
- 11** Kartu Catatan Skor Doha: Dari Hong Kong Hingga Bali
- 15** Panen Awal: Paket Bali
- 19** Proposal Ketahanan Pangan India:
Satu Langkah yang Salah dapat Mengancam
Ketahanan Pangan India Selamanya
- 27** Perubahan Geopolitik Perdagangan:
Aktor Lama dan Baru dalam Kemunduran
- 31** Barisan Kedua:
Dorongan Agresif untuk Generasi Baru Kesepakatan
Perdagangan Bebas
- 35** Gerakan-Gerakan Kunci dalam Perlawanan Dunia Terhadap
Agenda Pasar Bebas
- 39** Melampaui Bali:
Bahaya yang Diajukan oleh Agenda Ekonomi Paska-Bali
- 44** Tolak WTO; Dan Kembali Hidup!
- 52** Apa yang bisa Kita Lakukan untuk MENGHENTIKAN WTO?

Pengantar

Pada November 2005, di tengah persiapan kampanye dan aksi di berbagai belahan dunia menuju Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Hong Kong, Focus on the Global South mempublikasikan sebuah buku panduan berjudul Panduan Penggulingan WTO (Derailer's Guide to the WTO).

Panduan ini disusun untuk membantu para aktivis gerakan mengenali kebohongan yang ada dalam perjanjian perdagangan dan juga membahas isu-isu kunci yang menjadi dasar perundingan di berbagai bidang penting seperti pertanian, akses pasar non-pertanian (NAMA) dan juga sektor jasa. Membedah pemakaian bahasa-bahasa teknis dan 'pola bahasa perdagangan (trade speak)' dalam pertemuan negosiasi, kami juga menelaah hal-hal apa saja akan berdampak pada kehidupan dan mata pencarian masyarakat dan juga pengaruhnya terhadap proses mencapai pembangunan yang merata.

Buku petunjuk ini juga menelaah lebih dalam dinamika politik yang ada di antara negara-negara tersebut untuk membantu para pembaca memahami kedudukan apa saja yang mereka ambil dan siapa pihak berkepentingan untuk menggerakkan negosiasi-negosiasi tersebut.

Bahkan saat itu, ketika banyak perhatian tertuju pada negosiasi di dalam WTO, di luar sudah banyak muncul gerakan anti-WTO yang kuat di kalangan masyarakat sipil dan aktivis. Untuk menggulingkan WTO, sebagaimana telah dijelaskan dalam buku panduan; "strategi aktif untuk menutup WTO selamanya adalah mencegah terjadinya kesepakatan bersama di setiap perundingan mereka," karena "keputusan bersama" sebagaimana telah dijelaskan oleh Walden Bello, adalah

"Titik Lemah" WTO. Rencana ini bukan untuk mereformasi WTO (Lihat *Mengapa WTO Tidak Dapat Dirubah oleh Siapapun*, hal. 3).

Tujuan aksi pada tahun 2005 adalah menginterfensi Pertemuan Tingkat Menteri WTO di Hong Kong yang waktu itu dilaksanakan pada bulan Desember. Apa yang terjadi di Hong Kong masih teringat jelas, khususnya di kalangan gerakan Asia, sebagai salah satu tonggak bersejarah dalam gerakan rakyat melawan perdagangan bebas dan globalisasi korporasi. "**Down Down WTO (Jatuhkan Jatuhkan WTO)**" menjadi seruan ribuan aktivis berbaris dan bergerak pada Gerakan Rakyat tanggal 17 Desember 2005 di Wan Cai.

Meskipun banyak aksi protes besar dan perlawanan yang muncul, namun, pertemuan tingkat tinggi tersebut tetap menghasilkan Deklarasi Tingkat Menteri Hong Kong yang mana mereka bersama-sama menegaskan kembali keyakinan pada sistem perdagangan multilateral oleh berbagai pemerintah dan memetakan arah untuk melanjutkan perundingan Doha.

Namun, momentum yang dicapai pada pertemuan di Hong Kong itu tidak bertahan lama. Pertentangan antar negara semakin meningkat dan sejak itu pembahasan-pembahasan berada pada posisi kebuntuan untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, pernyataan bahwa negosiasi WTO telah "hancur" menjadi pendapat umum.

Semenjak kejadian di Hong Kong, pertemuan-pertemuan berikutnya dipindahkan ke Jenewa, kandang bercokolnya WTO, sebagai jalan terbaik untuk mengadakan pembahasan langsung dan mungkin dapat menghindari dari aksi-aksi protes. Ketika 'pertemuan terbatas

tingkat menteri' di Jenewa tahun 2008 gagal, banyak pendukung perdagangan bebas siap untuk melempar kesalahan kepada Putaran Doha, dan juga muncul banyak keraguan yang kuat akan kredibilitas WTO.

Untuk mempertahankan kredibilitas, beberapa upaya terus dilakukan untuk menghidupkan kembali pembahasan dan mengarahkan Putaran Doha pada sebuah kesimpulan. Tahun 2009, ketika itu Direktur Jendral WTO Lamy bercuap-cuap tentang "peran WTO sebagai penyeimbang di tengah krisis ekonomi". Pada tahun 2011, merasakan adanya momentum politik untuk merencanakan sebuah cara baru menuju kesimpulan pada Putaran Perundingan Doha, Ketua Konferensi Investasi dan Perdagangan Nigeria, Menteri Olusegun Aganga mengeluarkan hasil dokumen "Unsur-unsur Pedoman Berpolitik" yang sedianya akan menjadi tolak ukur rencana politik WTO menuju pertemuan Bali 2013 mendatang. Rencana tersebut memusatkan perhatiannya pada kebutuhan untuk memajukan pengambilan keputusan di perjanjian sementara atau yang sudah pasti di keseluruhan wilayah atau upaya tunggal. Hal ini juga fokus pada kebutuhan untuk mengeksplorasi pendekatan negosiasi baru. (Lihat *Kartu Catatan Skor Doha*, hal. 8).

Satu bagian pokok agenda yang saat ini sedang didorong oleh Amerika Serikat adalah membawa kepada WTO proses liberalisasi dengan standar tinggi khususnya di bidang hak kekayaan intelektual dan investasi, yang telah dibentuk dengan nama "Generasi Baru FTA (New Generation FTA)". (Lihat *Barisan Kedua*, hal. 31)

Pada tanggal 3-6 Desember 2013, Konferensi Tingkat Menteri ke-9 (MC9) WTO akan diadakan di Bali, Indonesia. "The Bali Ministerial" adalah pertemuan pertama sejak pertemuan Hong Kong delapan tahun lalu yang akan dilaksanakan di luar Jenewa. Pertemuan Tingkat Menteri di Bali ini menjadi sangat penting dengan alasan-alasan berikut. Pertama, pertemuan ditujukan

untuk mensahkan Paket Bali atau paket kesepakatan kunci lainnya yang dapat disahkan diawal (lihat *Panen Awal: Paket Bali*, hal. 15). Sebuah kesepakatan yang disahkan diawal akan memberikan nafas baru bagi putaran pembahasan Doha yang sekarat atau menyingkirkan kesepakatan tersebut selamanya dengan tujuan membuka jalan bagi pembahasan baru, dengan perbincangan yang lebih ambisius. Kedua, pertemuan Bali diimpikan sebagai momentum kunci untuk mendorong standar yang lebih tinggi akan proses liberalisasi dengan maksud menjadikan WTO sebagai institusi abad 21.

Ketika edisi pertama *Panduan Menggulingkan WTO* dipublikasi pada tahun 2005, perlawanan terhadap WTO masih sangat tinggi. Dari berbagai penjurur dunia, upaya-upaya dari bermacam-macam sektor dan kelompok bertemu di program kampanye dan koalisi, menjadi pelopor aksi dan mobilisasi menentang WTO. Pada saat itu panduan ini ditujukan untuk memberikan kontribusi dalam menguatkan kampanye-kampanye yang sedang berjalan ini dengan mengedepankan saran-saran untuk tindakan nyata di tingkat lokal, nasional dan dunia. Namun dari tahun ke tahun, perhatian dan tenaga gerakan semakin bergeser dari WTO dan juga pada masalah-masalah mendesak lainnya seperti perdagangan bilateral dan berbagai kesepakatan penanaman modal (investasi) yang semakin tinggi di tahun-tahun belakangan ini dan juga masalah mendesak global lain seperti perubahan iklim.

Sebagaimana Pertemuan Tingkat Menteri di Bali (The Bali Ministerial) pada bulan Desember tahun ini semakin mendekat, ada kebutuhan mendesak untuk menaikkan kembali energi gerakan menentang WTO dan agenda perdagangan bebasnya. Kita perlu menyatukan upaya-upaya bersama untuk mencegah pencapaian kesepakatan di pertemuan Bali nanti untuk menekan rencana menguatkan WTO setelah pertemuan Bali nanti.

Sebuah Pohon Lahir Bengkok Tidak akan Pernah Lurus Batangnya: Mengapa WTO Tidak Dapat Dirubah oleh Siapapun

Sejak awal berdirinya, di antara gerakan masyarakat sipil telah banyak terjadi perdebatan mengenai WTO. Sebagian kelompok melihat bahwa mereformasi WTO adalah mungkin dan kelompok lain berpendapat bahwa tidak ada satu factor yang dapat merubah WTO dan mereka sepakat untuk lebih baik untuk membubarkannya. Sedikit banyaknya, slogan “Kecilkan atau Hilangkan WTO” menggambarkan pokok dalam dua pendekatan ini. Sekarang, setelah hampir dua dekade WTO berdiri, fakta-faktanya semakin terlihat jelas.

Keterbatasan Untuk Berdagang

WTO dimulai dengan janji bahwa melalui “perdagangan bebas” akan ada peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi secara global. Namun hari ini, kita melihat semakin jelas bahwa janji itu tidak mungkin terpenuhi, karena pertumbuhan ekonomi yang tidak berujung di bumi yang terbatas ini tidak akan pernah terjadi. Sumber daya alam bumi sudah hampir habis dihisap dan juga saat ini makin banyak gangguan terhadap sistem daur ulang (siklus) planet bumi yang akan berdampak terhadap lingkungan di luar perkiraan kita. Pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar dan janji “pembangunan” itu tidak sampai kepada rakyat miskin. Saat ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Janji bahwa perdagangan bebas akan memberikan keuntungan kepada rakyat miskin hanyalah sebuah mitos.

Kenyataannya, jika kemiskinan benar-benar dapat ditangani dan rakyat miskin semakin berkurang, menaikkan pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah menjadi jawaban, tetapi re-distribusi (pembagian) kekayaan dan memperbaiki ketidak setaraan yang diperburuk oleh sistem kapitalis. Eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap planet bumi mengatas-namakan pertumbuhan ekonomi

yang tidak berujung menempatkan kita pada jalur bunuh diri dan kehancuran. Jika sasaran WTO untuk peningkatan ekonomi yang terus-menerus bertumbuh ingin terpenuhi, satu planet harus hancur karenanya.

Perdagangan Global untuk Siapa?

Masalah tentang WTO yang nyata dan mengapa mereka tidak dapat diperbaiki adalah tidak hanya organisasi ini mempunyai batang yang sejak awal telah bengkok, lebih lagi akarnya berdiri pada prinsip keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan tidak untuk menguntungkan umat manusia dan alam.

Bahkan, setelah 18 tahun keberadaannya, WTO menyadari bahwa perdagangan global hanya berpusat pada sejumlah kecil perusahaan besar.

“Apakah perdagangan hanya terpusat dalam genggamannya beberapa perusahaan global?” Pertanyaan WTO ini muncul di Laporan Perdagangan Dunia 2013. Dan jawabannya adalah: “Dari penemuan-penemuan yang ada memberi kesan bahwa transaksi perdagangan saat ini utamanya didorong oleh beberapa perusahaan dagang besar yang ada di beberapa belahan dunia.”

Laporan WTO ini juga menyatakan:

"Dari tabel B.13, Kami juga melihat transaksi-transaksi ekspor terkonsentrasi di kalangan **segelintir pengeksport: 1 persen dari pengeksport besar berkontribusi lebih dari 80 persen** keseluruhan jumlah ekspor Amerika Serikat. Selain itu, **10 persen pengeksport teratas mempunyai rekening transaksi ekspor Amerika lebih dari 96 persen.** (Bernard et al., 2009). Di negara-negara Eropa dapat dilihat dari tabel di bawah ini, rata-rata saham dari 1 persen dan 10 persen pengeksport teratas masing-masing adalah 50 persen sampai 85 persen. (Mayer dan Ottaviano, 2007). Negara-negara berkembang juga menunjukkan pola yang sama, rata-rata 81 transaksi ekspor bermuara di antara lima perusahaan eksport teratas. (Cebeci et al., 2012)."

Hal ini sangat menarik untuk disorot bahwa di Amerika Serikat saham dari 1 persen

perusahaan pengeksport teratas terus meningkat pada tahun 1993 dan 2002, berawal 78.8 persen menjadi 80.9 persen dan juga di sebagian besar Negara berkembang hanya 3 sampai 4 perusahaan yang memegang 80 – 90 lebih transaksi ekspor.

Hal ini bukan sebuah kejutan baru, bahkan dengan peraturan yang seharusnya adil, pada kenyataan yang tidak adil ini, peraturan tersebut hanya menguntungkan mereka yang mempunyai kekuasaan. Dalam rejim "perdagangan terbuka" atau "perdagangan bebas" siapa yang akan menang – ikan hiu atau sarden? Walaupun dengan "perlakuan istimewa dan berbeda" di tujukan untuk kepentingan ikan sarden, ikan hiu sudah tentu akan tetap menang. Perusahaan "superstar" akan menjadi pemenang karena mereka mempunyai jumlah, modal dan kekuatan monopoli yang memberikan "keuntungan komparatif" bagi mereka.

Tabel B. 13: Pembagian Ekspor dihitung dari pengeksport terbesar (persentase)

Negara	Tahun	1% Teratas	5% Teratas	10% Teratas
Amerika Serikat	1993	78.2	91.8	95.6
	2002	80.9	93	96.3
Negara-negara Eropa				
Belgia	2003	48	73	84
Perancis	2003	44	73	84
Jerman	2003	59	81	90
Hungaria	2003	77	91	96
Italia	2003	32	59	72
Norwegia	2003	53	81	91
Inggris (UK)	2003	42	69	80
Negara-negara Berkembang*				
Brazil	2009	56	82	98
Meksiko	2009	67	90	99
Bangladesh	2009	22	52	90
Turki	2009	56	78	96
Afrika Selatan	2009	75	90	99
Mesir	2009	49	76	96
Iran	2009	51	72	94

Sumber: Bernard and Jensen (1995), Bernard et al. (2007), Mayer and Ottaviano (2007), Cebeci et al. (2012).

*Untuk negara-negara berkembang yang dilaporkan dalam WBEDD, kami memberitakan pembagian ekspor yang dilakukan oleh 25% perusahaan teratas daripada 10% perusahaan dikarenakan ketersediaan data.



Sebuah Konstitusi Global Baru untuk Perusahaan Trans-national

Permasalahan yang sedemikian dalam dan sangat mengganggu. Melalui peraturan-peraturan "perdagangan bebas" di dalam WTO, Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTAs) dan Perjanjian Investasi Bilateral (BITs) kami menyaksikan bahwa dalam penulisan dan penerapan beberapa bagian konstitusi global baru ini hanya menguntungkan Perusahaan Trans-nasional. 60 kesepakatan di bawah WTO tidak hanya meliputi masalah perdagangan berupa barang. Kesepakatan itu juga berhubungan dengan masalah pangan, kesehatan, lapangan kerja, air, energi, iklim, lahan, keadilan dan hampir di seluruh wilayah yang mana Negara-negara berdaulat hadapi setiap saat. Kami melihat peraturan perdagangan global tersebut menginjak-injak kedaulatan banyak Negara, memaksa pemerintahan mereka untuk tunduk terhadap mengambil alih ruang gerak untuk kebijakan dalam negara mereka sendiri.

Tujuan utama dari konstitusi baru ini – dengan WTO menjadi dasar dan juga Kesepakatan

Perdagangan Bebas (FTAs) dan Perjanjian Investasi Bilateral (BITs) sebagai tentara terdepan- adalah untuk mengecilkan kekuasaan Negara dan membiarkan perdagangan bebas terus meluas dan menentukan apa yang baik bagi kehidupan.

Keterbatasan akan pendekatan reformis

Sekarang, kalau ini adalah wajah WTO yang sebenarnya, apa bisa kita memperbaiki WTO? Apakah mungkin, jika kita menggantinya menjadi sebuah organisasi baru yang daripada mempromosikan kompetisi untuk menguntungkan sejumlah kecil pengeskor "superstar", lebih mempromosikan solidaritas, saling melengkapi dengan implementasi yang nyata akan peraturan-peraturan tidak lurus (asimetris) untuk kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan juga mampu memelihara alam?

Banyak organisasi masyarakat sipil yang membuat usulan-usulan (proposal) untuk merubah aspek-aspek tertentu dalam tubuh WTO, tetapi secara nyata apakah proposal-

proposal ini dapat merubah hakikat dari WTO? Beberapa proposal bagus yang Focus dukung karena isinya mereka mengusulkan untuk menghentikan perluasan dari WTO atau tuntutan, sebagai contoh, membuat ruang kebijakan yang lebih luas untuk obat-obatan generic atau memberikan subsidi kepada petani-petani kecil, namun kembali pada kenyataan yang ada apakah kita dapat merubah watak asli WTO untuk mereka mengikuti jalan ini?

Seruan-seruan yang paling radikal adalah tuntutan untuk memutuskan wilayah-wilayah cengkraman WTO seperti pertanian, layanan jasa, kekayaan intelektual investasi dan lainnya. Ini juga salah satu usaha untuk kembali pada GATT (Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan) yang hanya menangani wilayah barang. Pendekatan ini akan membatasi dampak dari kanker tersebut tetapi tidak mengangkat kanker itu sendiri. Contoh, banyak usulan untuk inisiasi iklim dihentikan dengan alasan-alasan bahwa inisiasi tersebut melanggar peraturan "Perlakuan Nasional" GATT yang menyatakan bahwa Negara harus memperlakukan perusahaan trans-nasional dan perusahaan (penghasil) lokal dengan adil, sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak.

Dengan kata lain, bisakah kita membatasi wawasan kita hanya dengan menolak, menaklukkan beberapa hal yang bersifat fleksibel, memotong beberapa masalah dan menghentikan perluasan WTO pada saat agenda perdagangan bebas terus melaju cepat melalui peraturan-peraturan di FTAs (yang kita juga coba untuk hentikan atau batasi) sampai pada akhirnya cepat atau lambat WTO akan menghidupkan kembali negosiasi-negosiasi mereka dan mengambil apa yang sudah ada di FTAs sebagai bahan acuan?

Mengapa kita harus bersuara lebih jelas dan lantang

WTO tidak bisa diperbaiki, ditegur atau dibalikan untuk melayani rakyat dan membangun keselarasan dengan alam. Satu-

satunya cara untuk menyelamatkan lapangan perkejaan layak, hak akan pangan dan perlidungan akan alam adalah menyingkirkan WTO dan melucuti kekuatan perusahaan trans-nasional dan elit-elit politik dan ekonomi.

Tetapi, sementara kita bertarung di pertempuran besar ini untuk tujuan jangka panjang, kita juga harus terus terlibat langsung dalam peperangan kecil untuk menghentikan perluasan WTO dan rejim perdagangan bebas. Terus berjuang untuk menemukan fleksibilitas dan membuka kontradiksi dalam kesepakatan-kesepakatan itu, tetapi dengan tidak mempercayai ilusi untuk memperbaiki WTO maupun FTAs. Sasarannya bukan hanya membuka kekosongan yang menguntungkan penerapan beberapa kebijakan (obat-obatan generic, pelaksanaan kenaikan harga bagi kaum petani, dll) tetapi juga melemahkan dari dalam kesepakatan-kesepakatan ini, sementara pada saat yang sama kita terus membangun kekuatan untuk menjatuhkan mereka. Kita harus menggunakan taktik yang ada dan tersedia dari dalam maupun luar, tetapi tidak menimbulkan kekebingungan dalam pelaksanaan keseluruhan strategi kita dan hubungannya dengan inti tujuan perjuangan kita.

Kita tidak akan pernah bisa membongkar rejim perdagangan bebas ini dengan taktik negosiasi. Strategi Taktik dari dalam kadang-kadang sangat berguna untuk dapat menghentikan satu kesepakatan atau meblokir sebuah negosiasi, atau untuk merubah sebuah pasal tetapi jika kita ingin membongkar rejim perdagangan bebas atau sebuah institusi seperti WTO kita harus membuat keseimbangan dan kekuatan yang dipimpin oleh gerakan rakyat. Dan untuk mengikuti jalan ini, kita harus mengatakan secara jelas bahwa pohon WTO yang sudah bengkok tidak dapat diluruskan, tidak sekarang dan selamanya.

Akhir dari perdebatan. Reformasi adalah sebuah ilusi. Jika kita ingin mempunyai masa depan bagi planet bumi dan umat manusia kita harus **MENGAKHIRI WTO!**

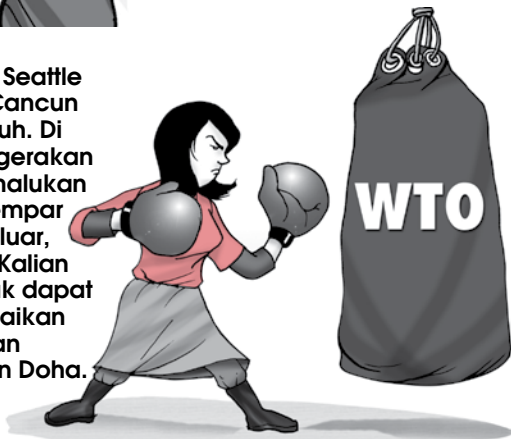
Beberapa Fakta Mengenai WTO Mengapa WTO Tidak Bisa Berubah Haluan

Siapa Pendatang Baru Ini? Apakah dia akan ada di pihak kita?



Tapi peraturan-peraturan perdagangan 'terbuka' yang "adil" ini tidak selalu adil; pihak yang menang selalu datang dari perusahaan-perusahaan besar di Negara-negara maju, seperti Amerika.

Pertemuan Seattle gagal. Di Cancun kalian jatuh. Di Hong Kong gerakan rakyat memalukan dan melempar anda keluar, ingat itu? Kalian bahkan tidak dapat menyelesaikan Putaran Perundingan Doha.



KERUNTUHAN WTO

Seattle (1999) - dikarenakan proses pengambilan keputusan yang tidak demokratis dan adanya aksi protes besar di jalan-jalan Seattle.

Cancun (2003) - karena permasalahan yang disebut baru atau masalah investasi Singapura, kebijakan-kebijakan tentang persaingan, pengadaan dan fasilitas perdagangan, dan juga aksi perlawanan yang muncul di seluruh dunia.

Negara-negara miskin ingin menyelesaikan masalah pertanian yang berdampak langsung bagi mereka, contoh; Amerika dan Eropa mensubsidi industri pertanian mereka dan kurangnya akses terhadap pasar tersebut melawan Negara kaya yang ingin mengajukan permasalahan-permasalahan baru yang hanya akan menguntungkan mereka. Sebaliknya ada KEBUNTUAN.

Hong Kong (2005) - disebut juga sebagai Putaran Pembangunan Doha yang tadinya ditujukan untuk kepentingan Negara-negara miskin, ironisnya ketidakadilan perdagangan global yang menguntungkan Negara-negara maju, akhirnya terbuka. Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan juga menjadi sorotan.

Jenewa (2008) - keruntuhan di pertemuan kecil tingkat Menteri di atas sejumlah permasalahan yang diperdebatkan termasuk tentang perlindungan dalam wilayah pertanian.



Apakah WTO Masih Ada dan Hidup?

- Pada bulan Maret 2013, anggota WTO sudah mencapai 159 Negara; 76 Negara adalah anggota awal yang menandatangani Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) -WTO pada bulan Januari 1995. RRC (Cina) bergabung pada tahun 2001. Rusia bergabung pada tahun 2012. Republik Demokratik Rakyat Lao bergabung pada bulan Februari 2013.
- WTO terus menjual mitos-mitosnya -sejak berdirinya pada tahun 1995 keberadaan organisasi ini selalu menjual janji-janji yang katanya akan memberikan keuntungan kepada kehidupan umat manusia.

Tidak Diskriminatif - perlakuan yang sama antara perusahaan-perusahaan dari dalam maupun luar negeri.

Hubungan Timbal Balik - Bangsa/Pemerintahan akan menempuh kompromi-kompromi yang sama.

Transparansi - Peraturan-peraturan dalam negosiasi yang memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara.

Perlakuan Khusus dan Pembedaan - Mendorong "diskriminasi positif" dikarenakan setiap Negara mempunyai riwayat perdagangan yang berbeda.

Kami masih dapat berubah. Lihat!
Kami masih punya mekanisme untuk memajukan perdagangan global.



Tipu muslihat di lengan baju WTO:

TRIPS - Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual: contoh: Manfaat teknologi untuk penelitian dan produksi obat-obatan

GATS - Kesepakatan Umum tentang Perdagangan Jasa: misal liberalisasi sektor umum (public).

Dispute Settlement Mechanism - Kalian bahkan bisa menuntut perusahaan dan pemerintah di pengadilan WTO!

Tetapi yang terjadi adalah Negara yang seringkali digugat:

- 433** kasus perselisihan yang saat ini sedang berlangsung di ICSID gugatan Investor terhadap Negara
- 95** gugatan terhadap Negara oleh investor saat ini sedang berlangsung
- 59** tuntutan melawan Negara di tahun 2012

Tidak, Kamu tidak Bisa Tetap di sini! KAMI TERIAKAN TIDAK TERHADAP PERUBAHAN WTO!



Sejauh ini 60 kesepakatan yang ada di bawah WTO menguntungkan perusahaan trans-nasional, bukan rakyat, bukan alam!

Perusahaan trans-nasional sudah memperluas kekuasaan mereka terhadap wilayah pangan, kesehatan/obat-obatan, air, tanah dan sumber daya lainnya.

Putaran-Pembangunan Doha: Kebuntuan antara Persaingan dan Bertahan hidup

Ronde Pembangunan Doha, juga disebut Agenda Pembangunan Doha (DDA), adalah ronde negosiasi-perdagangan terkini WTO. Sejak di mulai pada November 2001 di Doha, Qatar, pertemuan tingkat menteri saat ini telah mencapai tahun ke tiga belas, dengan tujuan awal mengurangi rintangan perdagangan secara global untuk mempermudah perluasan perdagangan global. Setelah Doha, pertemuan Kementerian dilanjutkan di Cancun, Mexico pada tahun 2003, dan Hong Kong pada tahun 2005. Negosiasi yang berkaitan diadakan di Paris, Perancis (juga pada tahun 2005), Postdam, Jerman pada tahun 2007, dan Jenewa, Swis pada tahun 2004, 2006, dan 2008.

Sejak ronde ini dimulai pada tahun 2001, negosiasi-negosiasi tersebut selalu menggambarkan perbedaan yang terus ada antara Amerika Serikat(US), Uni Eropa (EU), dan negara-negara berkembang lain mengenai isu-isu utama, dan telah mengalami 2 kegagalan. Pertama saat Pertemuan Tingkat Menteri di Cancun, September 2003 dan kedua kalinya di Postdam, Juni 2007. Sejak 2008, negosiasi telah mengalami beberapa kebuntuan akibat perbedaan posisi dalam isu utama antara anggota negara-negara maju yang dipimpin oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, dan negara berkembang yang diwakili oleh India, Brazil, RRC, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Perbedaan yang dalam dari perpecahan ini terutama pada bidang pertanian, tarif industri dan hambatan non-tarif, pelayanan jasa dan solusi-soluis perdagangan.

Kerangka kerja WTO sangat berpihak hanya kepada negara kaya, sebagaimana secara sistematis mendukung kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional. Ekonomi negara-negara miskin, yang kurang memiliki kekuatan negosiasi untuk melawan negara-negara dengan daya dagang besar, biasanya menderita dari dampak-dampak yang merusak oleh sistem perdagangan yang tidak adil.

Ronde pembangunan yang tidak menawarkan pembangunan kepada kaum miskin

Ronde Pembangunan Doha diberi nama seperti itu untuk menarik perhatian negara-negara berkembang untuk berpartisipasi. Setelah merasakan dampak dari Ronde Uruguay, negara-negara berkembang menyadari bahwa secara kolektif mereka telah memberikan terlalu banyak dan melepaskan peluang mereka untuk proses pembangunan ketika mereka secara kolektif sepakat aka nisi dari 500 halaman dokumen yang mereka tandatangani pada tahun 1994. Ronde Uruguay adalah negosiasi perdagangan multilateral ke delapan yang diadakan di bawah kerangka kerja Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT). Hal ini meliputi periode tahun 1986 hingga 1994 dan menyebabkan terbentuknya WTO. Dipandang sebagai negosiasi terbesar yang pernah terjadi dalam

Pedoman Penggulingan WTO dan Rezim Perdagangan Bebas 2.0

sejarah, negosiasi ini membawa kekuasaan besar untuk memperluas aturan-aturan perdagangan GATT ke wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi pengecualian dan sulit untuk diliberalisasi seperti wilayah pertanian dan tekstil, dan juga bidang-bidang baru lain yang semakin penting namun tidak dimasukkan sebelumnya seperti perdagangan dalam layanan (jasa), kekayaan intelektual dan kebijakan akan penyimpangan investasi dagang.

Untuk menurunkan dampak perjanjian-perjanjian sebelumnya, negara-negara berkembang (termasuk Negara kekuatan ekonomi baru seperti Cina, Brazil, dan India) menuntut penurunan tarif dan subsidi pertanian dikalangan negara-negara maju, akses terhadap pasar non-timbal-balik untuk sektor manufaktur, dan perlindungan untuk industri mereka. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara maju lainnya, disisi lain, meminta peningkatan akses ke sektor layanan dan

industri di negara-negara berkembang sembari menegaskan untuk mempertahankan beberapa ukuran perlindungan bagi sektor pertanian mereka. Karena dua sisi telah menolak untuk mengatasi perbedaan ini, WTO sejauh ini telah gagal mencapai kesepakatan yang komprehensif.

Sebelum runtuhnya negosiasi pertama di Cancun, negara maju telah mendorong untuk diadakan ronde lain tentang liberalisasi perdagangan saat Pertemuan ketiga tingkat Menteri WTO di Seattle pada November 1999. Protes besar yang diikuti oleh petani, buruh, aktivis lingkungan, dan kelompok gerakan anti perubahan dan globalisasi bersama-sama “pemberontakan” negara-negara berkembang melawan meningkatnya proses negosiasi yang mengecewakan mengakibatkan keruntuhan hebat akan proses pembahasan-pembahasan yang terjaditahun itu¹. Sebuah Protes Global yang sangat bersejarah diabadikan dalam film “Battle in Seattle”.



Tahun setelahnya, negara-negara berkembang mengalami tekanan yang luar biasa di Doha untuk menyetujui peluncuran ronde baru dengan tujuan untuk "menyelamatkan" ekonomi global. Di Seattle, banyak terjadi pelintiran dan ancaman-ancaman akan pembalasan "penghapusan-kerjasama" ditambah dengan tawaran paket bantuan besar-besaran ke negara-negara berkembang yang "keras-kepala". Memainkan taktik jahat dengan tidak mengikut sertakan sebagian besar negara-negara berkembang dari proses pengambilan keputusan. Banyak negara-negara berkembang mengeluh tentang pertemuan-pertemuan rahasia terbatas yang dihadiri oleh 30 sampai 35 pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Diplomasi perdagangan licik ini terjadi di Ronde Pembangunan Doha, yang mana banyak pihak berusaha menunjukkan bahwa hal ini sedikit sekali kaitannya dengan proses pembangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akses negara-negara maju ke pasar-pasar² negara-negara berkembang.

Seperti namanya, Ronde Doha seharusnya menghasilkan manfaat yang ramah pembangunan, daripada menekan negara-negara berkembang untuk menciptakan akses pasar yang komprehensif bagi perusahaan transnasional dari negara-negara kaya dengan membebaskan sektor pertanian, industri, dan jasa mereka. Pertanian telah menjadi pengikat dari Agenda Pembangunan

Doha. Amerika dan Uni Eropa umumnya dikritik oleh negara-negara berkembang disebabkan dukungan terhadap pengeluaran pertanian domestik mereka untuk petani-petani Amerika dan Eropa yang mana melukai ekonomi negara-negara berpenghasilan kecil.

Sebagai tambahan terhadap izin-izin dibidang pertanian, beberapa isu paling penting bagi negara-negara berkembang termasuk perizinan akan obat-obatan dan perlindungan hak paten, fasilitasi perdagangan melalui harmonisasi dan penyederhanaan prosedur bea cukai, dan perlakuan berbeda terhadap negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang juga ingin masalah mereka dalam melaksanakan kewajiban perdagangan saat ini ditangani. Ronde ini semakin dikritik untuk dampak- merusak pada tenaga kerja dan lingkungan liberalisasi perdagangan dan investasi. Isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan telah meningkat seiring negara-negara miskin terus kehilangan kapasitas untuk melindungi kepentingan ekonomi³ mereka.

- 1 Walden Bello, "The Meaning of Seattle: Truth Only Becomes True Through Action", *Yes Magazine*, 28 November 2009, posted in <http://focusweb.org/node/1550>
- 2 Fatoumata Jamara and Aileen Kwa, 2004, *Behind the Scenes at the WTO: The Real World of International Trade Negotiations*, Updated Edition, Zed Books
- 3 Statement of the Climate Space of the World Social Forum in Tunis, "To Confront the Climate Emergency We Need to Dismantle the WTO and the Free Trade Regime", 5 September 2013 <http://focusweb.org/content/confront-climate-emergency-we-need-dismantle-wto-and-free-trade-regime>

Kartu Catatan Skor Doha: Dari Hong Kong Hingga Bali

Pertemuan Tingkat Menteri di Hong Kong tahun 2005 dianggap oleh pergerakan Asia sebagai tonggak kampanye melawan WTO. Meski ada protes keras di Hong Kong dan seluruh dunia. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang membuka jalan untuk berlanjutnya Pembicaraan Doha setelah dua pertemuan sebelumnya yang berturut-turut diadakan yaitu Seattle (1999) dan Cancun (2003) menemui kegagalan. Pada Desember 2013, WTO kembali ke Asia saat Pertemuan Tingkat Menteri ke 9 berlangsung di Bali, Indonesia. Sangat penting untuk menelusuri kembali negosiasi Doha dari Hong Kong ke Bali.

Hong Kong, 2005

Pertemuan tingkat menteri ke 6 adalah titik balik untuk WTO. Nasib Putaran Doha—yang mana disebutkan akan bergerak menuju suatu kesimpulan pada thn 2006 sebagaimana diramalkan, atau bias juga negosiasi ini akan



hancur tergilas masalah-masalah besar (kehancuran ketiga terjadi dalam kurun waktu 10 tahun)—akan ditentukan oleh Kota-kota besar di Asia. Jika dia hancur, maka ini akan menjadi pukulan besar bagi legitimasi atau kekuasaan WTO itu sendiri.

Hong Kong menghasilkan Deklarasi Menteri yang diambil pada 18 Desember 2005 yang "meletakkan putaran kembali ke jalurnya". Hal ini dipuji sebagai 'interim deal'/kesepakatan sementara yang menurut Pascal Lamy, menggambarkan 60 persen penyelesaian Putaran Doha.

Dalam bidang pertanian, ada kesepakatan untuk mengurangi subsidi ekspor sebelum tahun 2013. Begitu juga dengan pendekatan untuk mengurangi sokongan domestic dan tariff dan pada beberapa pergerakan dalam hal produk-produk tertentu dan mekanisme perlindungan khusus.



Kesepakatan Hong Kong: Skor Nyata

Kesepakatan ini adalah bentuk cacat dan tidak demokratisnya “Kerangka Kerja Juli” tahun 2004 sebagai dasar perundingan. Teks Hong Kong samar-samar dalam wilayah perdebatan, membuat ruang lingkup yang kecil untuk negosiasi sementara di sisi lain sangat jelas untuk kepentingan negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk memproteksikan kesuksesan di Hong Kong dan mencegah kehancuran Negosiasi Doha.

Apa yang kita dapatkan dalam pertanian adalah komitmen untuk mengurangi subsidi ekspor dalam kurun 8 tahun, sementara hal itu seharusnya sudah dilaksanakan 10 tahun lalu. Negara-negara maju masih mengizinkan sokongan terhadap produk domestic yang bernilai milyaran dolar.

Dalam NAMA, kita mendapatkan Formula/Rumusan Swis yang ambisius dengan nilai koefisien 5-10 untuk Negara-negara maju dan 10-30 untuk Negara-negara berkembang. Nilai koefisien yang rendah dalam rumusan berarti pemotongan tariff yang lebih tinggi. Nilai koefisien juga melambangkan tingkat ikatan yang tinggi. Dalam kenyataannya nilai koefisien yang tinggi dibutuhkan untuk melindungi industri loka dan banyak Negara berkembang tidak memiliki kapasitas negosiasi untuk melindungi kepentingan mereka. Uni Eropa telah menawarkan dunia maju sebuah nilai koefisien 15 (contoh tariff tertinggi adalah 15 persen dalam produk industri). Untuk menjaga ruang kebijakan, Negara-negara berkembang memerlukan nilai koefisien sebanyak 290.

Deklarasi ini diulas diatas perdebatan tentang fleksibilitas dan pandangan yang kuat yang dikemukakan oleh Negara-negara berkembang bahwa masalah ini menghantam dimensi pembangunan dari putaran dan harusnya menjadi ketentuan yang berdiri sendiri.

Dalam sektor jasa, yang paling penting dilakukan adalah Benchmarking dan Pendekatan komplementer (termasuk juga plurilateral) yang merusak permintaan yang fleksibel dan proses penawaran. Usulan-usulan ini harus memiliki efek memaksa, mendesak Negara berkembang untuk membebaskan lebih banyak sector dan berkomitmen pada liberalisasi.

Di negosiasi NAMA, Formula Swis dimasukkan untuk pengurangan tariff, tanpa ada penjelasan detil dalam hal fleksibilitas untuk negara-negara berkembang.

Dalam sektor jasa, hasilnya adalah diambilnya Lampiran/Annex C yang menjelaskan mengenai tujuan dan pendekatan dan menetapkan waktu untuk negosiasi. Pendekatan-pendekatan termasuk membuat tolak ukur, negosiasi berbasis sector, dan pendekatan hubungan plural dalam hal permintaan dan penawaran.

Jenewa, 2008-2009

Setelah kemajuan di Hong Kong tiga tahun sebelumnya, sebuah pertemuan kecil tingkat menteri dilakukan di Jenewa 2008. Ini adalah momentum yang diharapkan oleh para pendukung setelah pembicaraan sebelumnya di kota Jenewa yang gagal.

“Semakin banyak bahan perdebatan terjadi di Hong Kong, demi memunculkan kemajuan, telah membangkitkan dan memicu banyak ketidaksepahaman diantara anggota WTO.”



<http://www.globalresearch.ca/the-greatest-depression-has-only-begun/25089>

Semakin banyak bahan perdebatan terjadi di Hong Kong, demi memunculkan kemajuan, telah membangkitkan dan memicu banyak ketidaksepahaman diantara anggota WTO. Salah satu hal penting adalah mekanisme perlindungan, dimana kepentingan impor Cina dan India diadu dengan permintaan Amerika Serikat untuk mendapatkan akses pasar produk-produk pertanian.¹

Negara-negara berkembang membenci arah pembicaraan yang menjauh dari tujuan pembangunan. Pertemuan tingkat menteri ke-7 diadakan kembali di Jenewa tahun 2009. Disebut-sebut sebagai pertemuan yang tidak negosiatif, Pertemuan ini diatur sebagai dasar untuk meninjau ulang WTO dan Putaran Doha dan mereformasi jalan buntu dari negosiasi. Ditengah krisis ekonomi, konferensi ini juga dimaksudkan untuk mengirimkan pesan kuat bahwa penting bagi WTO untuk berperan sebagai kekuatan penstabil ditengah krisis ekonomi.²

Jenewa 2011

Pertemuan tingkat menteri mengadopsi sejumlah putusan dalam berbagai area: kekayaan intelektual, perdagangan berbasis internet, ekonomi kecil, persetujuan Negara-negara miskin, pengabaian layanan terhadap Negara-negara maju, dan tinjauan ulang kebijakan perdagangan.

Ketua Konferensi Menteri Perdagangan dan Investasi Nigeria, Olusegun Olutoyin Aganga mengeluarkan "Element-elemen panduan politik" yang memberikan tolok ukur untuk agenda politik WTO menyongsong Bali. Dokumen tersebut menekankan 3 aspek penting:

Menekankan kembali pentingnya system perdagangan multilateral sebagai cara untuk memerangi proteksionisme pada saat krisis ekonomi. Pilar legitimasi WTO disorot dalam dokumen ini dimana birokrasi institusi, sengketa organisasi dan proses persetujuan anggota.

Menyebarkan hubungan antara perdagangan dan pembangunan dan mendorong penegasan kembali bahwa pembangunan adalah element penting dalam setiap pekerjaan. Penekanan khusus diberikan untuk membantu Negara-negara berkembang khususnya LDC (Negara Kurang Berkembang) untuk masuk menjadi anggota-berintegrasi. Elemen perdagangan dan pembangunan yang ditekankan dalam dokumen adalah: (1) Memprioritaskan kepentingan Negara miskin (2) harus menyelesaikan masalah negosiasi pertanian (3) Menegaskan kembali integritas perlakuan yang khusus dan (4) bantuan untuk perdagangan.

Kesimpulan dari Agenda Pembangunan Doha dengan kebuntuan yang berlanjut dalam negosiasi, pilihan terbaik kedua yang perlu dipikirkan adalah kesimpulan perjanjian bersyarat atau kesimpulan pasti dalam berbagai wilayah didepan kesimpulan penuh yang diambil. Dalam artikulasi sebelumnya, Pascal Lamy telah mengisyaratkan bahwa Doha akan memasukkan area dimana anggota telah mencapai kesepakatan. Pesan untuk para anggota adalah untuk mengeksplorasi secara penuh berbagai pendekatan negosiasi yang berbeda.

Bali, 2013

Pertemuan tingkat Menteri ke 9 WTO dijadwalkan pada minggu pertama di bulan Desember 2013 di Bali, Indonesia. Pertemuan Para Menteri di Bali diinginkan kembali untuk memberikan energi atas pembicaraan/ pertemuan perdagangan yang sebelumnya telah dilakukan dan menjaga legitimasi WTO sebagai pilar system perdagangan antar Negara. Hasil utama yang diharapkan dari pertemuan Bali adalah Perjanjian Panen Awal, yang disebut juga Paket Bali, yaitu serangkaian usulan di bawah Putaran Doha dalam hal fasilitasi perdagangan, pertanian, komitmen terhadap Negara-negara Kurang Berkembang (LDC) yang telah dihasilkan secara consensus dari setiap anggota (Lihat *Paket Bali*, hal. 15).

-
- 1 <http://ictsd.org/i/wto/wto-mini-mc-geneva-2008/englishupdates/15315/>
 - 2 http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/mn09a_30nov09_e.htm

Panen Awal: Paket Bali

Paket Bali adalah kesepakatan mengenai beberapa elemen dari agenda Doha yang diharapkan akan disampaikan pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 di Bali.

'Panen Awal' atau Paket Bali memiliki tiga komponen utama atau pilar: fasilitas perdagangan, pertanian, dan sebuah paket untuk anggota-anggota negara kurang berkembang (LDC - Least Developed Country).

Fasilitas perdagangan: "buah yang tergantung rendah"

Memangkas birokrasi, memperbaiki prosedur perbatasan atau bea cukai, dan mengurangi biaya-biaya perdagangan adalah tujuan utama dari agenda fasilitas perdagangan. Fasilitas perdagangan pertama kali menjadi terkenal di WTO sejak 1997 ketika dimasukkan ke dalam satu set topik-topik baru yang didorong oleh Negara-negara berkembang untuk dimasukkan ke dalam agenda WTO.

Sementara dimasukkannya fasilitas perdagangan ke dalam agenda sebagai salah satu yang disebut dalam isu Singapura (fasilitas perdagangan dengan kebijakan persaingan, pengadaan dan investasi pemerintah) telah ditentang keras—hal ini dipandang sebagai perluasan jangkauan WTO di luar isu perdagangan, dan bahkan memaksa lengsernya pembicaraan di Cancun—dimana isu fasilitas perdagangan kembali dimasukkan ke dalam agenda dan sekarang dianggap sebagai salah satu yang dapat disampaikan di pertemuan di Bali.

Proposal tersebut tampaknya menghasilkan dukungan yang luas di kalangan para anggota. Ini merupakan agenda utama Amerika Serikat pada pertemuan Bali¹ dan juga merupakan sebuah usulan yang sedang didesak oleh para pelaku bisnis.²

Yang ingin ditegaskan adalah, bahwa kesepakatan mengenai fasilitas perdagangan sama-sama memberikan keuntungan baik bagi negara maju dan berkembang. Seperti yang telah diharapkan, kesepakatan beberapa negara tentang fasilitas perdagangan disebut-sebut menghasilkan stimulus sebesar sebanyak US\$ 1 triliun.³ Mantan Direktur Jenderal WTO, Pascal Lamy, baru-baru ini menyatakan pandangannya bahwa "perundingan tentang fasilitas perdagangan adalah ibarat perumpamaan 'buah yang tergantung rendah'—nilai dari hasil akhir negosiasi tidak perlu dipertanyakan dan tidak seperti beberapa negosiasi perdagangan sulit lainnya di Putaran Doha, tidak ada risiko bagi petani, sopir taksi atau pekerja pabrik pakaian memprotes turun ke jalan-jalan."⁴

Secara pribadi, Direktur Jenderal baru Roberto Azevedo telah memandang secara konsisten sebuah kesepakatan fasilitas perdagangan sebagai sesuatu yang penting untuk disampaikan di Bali, dan seperti yang telah dia ungkapkan di India baru-baru ini, hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa "membantu meningkatkan kerjasama dan perdagangan Selatan dengan Selatan."⁵

Fasilitas perdagangan menjadi bagian dari agenda Doha tahun 2004 di bawah (Lampiran D) yang dinamakan July Package, disepakati

oleh para anggota menjelang rapat para menteri di Hong Kong. Mandat negosiasi terkini mengenai fasilitas perdagangan berisi dua tujuan yang luas, yaitu menempatkan langkah-langkah yang akan lebih mempercepat perdagangan; dan untuk meningkatkan bantuan teknis dan dukungan bagi peningkatan kapasitas di area ini, mengenali akan adanya kebutuhan untuk perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment/SDT) dalam perdagangan.

Versi revisi dari teks yang merupakan dasar dari negosiasi saat ini termasuk bagian di SDT (Bagian 2), yang menguraikan tiga kategori komitmen bagi Negara-negara yang berkembang dan paling kurang berkembang: Komitmen kategori A untuk ketentuan-ketentuan dan langkah-langkah yang sudah diterapkan oleh Anggota dan oleh karena itu harus dilaksanakan pada saat berlakunya perjanjian, Komitmen kategori B untuk ketentuan yang akan dilaksanakan setelah masa transisi, dan Komitmen kategori C untuk ketentuan yang akan dilaksanakan setelah masa transisi dan setelah akuisisi kemampuan

pelaksanaan. Banyak ketentuan-ketentuan pada bagian SDT bagaimanapun juga masih belum final dan hal ini mencerminkan perpecahan di antara negara-negara maju dan berkembang tentang fleksibilitas mereka.

Negara-negara berkembang menegaskan bahwa mandat dan program kerja untuk negosiasi-negosiasi mengenai fasilitas perdagangan mengakui SDT untuk Negara-negara berkembang dan paling kurang berkembang (LDC/least developed countries), dan kebutuhan bagi negara-negara maju untuk memberikan "dukungan dan bantuan untuk Negara-negara berkembang dan sangat kurang berkembang (LDC) secara komprehensif serta jangka panjang dan berkelanjutan, yang didukung oleh system pendanaan yang aman."⁶

Ada juga referensi yang kuat terhadap fakta bahwa penerapan kondisi mandat oleh negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang pada akuisisi finansial, teknis, dan pengembangan kapasitas, didasarkan pada pemberian bantuan tersebut oleh negara-negara maju anggota WTO.⁷



Judy A. Pasimio

Namun bagaimanapun posisi Amerika Serikat pada SDT terikat pada penilaian diri oleh negara-negara berkembang akan kapasitas pelaksanaan dan penolakan mereka untuk mengikat komitmen mereka terhadap dukungan keuangan untuk fasilitas perdagangan. Menurut USTR Michael Froman, "Di bawah proposal yang pertama kali dikemukakan oleh Amerika Serikat empat tahun yang lalu, dan kemudian diikuti oleh banyak pihak lain, negara-negara berkembang akan diizinkan untuk membuat jadwal pelaksanaan mereka sendiri-sendiri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini kebijakan perdagangan yang inovatif."⁸

Sementara perkiraan manfaat dari fasilitas perdagangan mengambang sekitar miliaran dolar Amerika Serikat, termasuk pengurangan biaya untuk perdagangan diperkirakan sekitar 10 persen untuk negara-negara maju dan sebanyak 14 persen untuk yang sedang berkembang, komponen yang hilang dari persamaan tersebut adalah pertanyaan tentang biaya implementasi untuk negara berkembang dan paling kurang berkembang. Menerapkan langkah-langkah baru pada fasilitas perdagangan berarti tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga akan memerlukan biaya tambahan yang terkait dengan meletakkan peraturan baru pada tempatnya, mendirikan lembaga-lembaga, perekrutan pegawai baru, membeli peralatan baru, dan membangun infrastruktur. Semua biaya ini dapat membengkak hingga lebih dari US\$100 juta.⁹

Pertanian

Ada sejumlah elemen kunci untuk kemungkinan kesepakatan pertanian di bawah paket Bali. Yang paling signifikan bagi negara-negara berkembang dan juga

yang paling diperdebatkan adalah usulan **G33 akan adanya penggudangan publik untuk keamanan pangan** yang sangat diajukan oleh India. Proposal ini berusaha untuk merubah Perjanjian tentang Pertanian untuk memungkinkan adanya program penggudangan publik yang dimaksudkan untuk mendukung petani-petani miskin berpenghasilan dan bersumber daya rendah bagi tujuan keamanan pangan. Unsur-unsur lain dari kemungkinan kesepakatan ketentuan pertanian meliputi persaingan ekspor, komitmen lama pada penghapusan subsidi ekspor (Mandat Hong Kong dihapus pada 2013), dan kesepakatan administrasi tingkat kuota tarif (TRQ/ tariff rate quota) impor—atau bagaimana mengimpor dalam kuota dapat dibagi kepada para importir, sebuah proposal G20 yang mencakup ketentuan mengenai perlakuan khusus dan berbeda dalam perdagangan.

Negara-negara kurang berkembang (LDC) dan pembangunan

Pada Mei 2013, Nepal, atas nama LDC Group, membuat pengajuan resmi untuk paket LDC untuk pertemuan Bali yang melibatkan empat bidang, yaitu (1) pelaksanaan keputusan akses pasar Bebas Tarif Bebas Kuota (Keputusan DFQF/duty free-quota free decision) diambil oleh para anggota pada Konferensi Tingkat Menteri Hong Kong pada tahun 2005, (2) ketentuan asal barang khusus atau *Preferential Rules of Origin*, (3) kapas, dan (4) pengoperasian *LDC Services waiver*.

Paket LDC untuk pertemuan di Bali memberikan perbincangan-perbincangan yang telah dilakukan sebuah lapisan dari 'agenda pembangunan' menjelang kesimpulan dari pembangunan Putaran Doha.

Namun dalam kenyataannya, apa yang LDC sebenarnya pertanyakan adalah hal-hal yang telah mereka sepakati di masa lalu. Pada DFQF misalnya, apa yang LDC harap untuk dicapai hanyalah keputusan untuk sepenuhnya melaksanakan komitmen yang dibuat delapan tahun lalu di Hong Kong untuk menyediakan akses Bebas Tarif Bebas Kuota untuk 97 persen dari produk yang berasal dari negara-negara LDC.

Pada kapas, sebuah sektor yang sangat penting bagi LDC, apa yang telah diusulkan oleh kelompok LDC, sadar akan permintaan umum untuk proposal yang "wajar dan layak" di pertemuan Bali, adalah perubahan pada dua isu yang sudah tercermin dalam Deklarasi Draft Menteri 2011 untuk memperbarui klausul macet di bawah komponen komersial kapas, dan menyusun ulang kata-kata dari bagian dalam Deklarasi untuk memungkinkan masukan dan diskusi tambahan tentang penjembatanan mekanisme konsultatif untuk kapas dan Bantuan untuk Usaha Perdagangan.

Dari keempat isu inti untuk LDCs di pertemuan Bali, mungkin poin tentang ketentuan asal barang khusus yang paling diperdebatkan. Apa yang LDC katakan adalah bahwa ketentuan asal barang ketat melarang pemanfaatan pilihan secara penuh untuk LDC, maka mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan akses pasar khusus untuk produk-produk mereka.

Dalam pengajuan resmi mereka kepada komite negosiasi perdagangan, kelompok LDC mengakui upaya yang telah dilakukan untuk mereformasi ketentuan asal barang di beberapa negara maju untuk mengatasi masalah ini, tetapi LDC juga menunjuk bahwa "tanggapan dari Negara-negara yang diberikan pilihan belum menggembirakan,"¹⁰

meskipun mandat yang jelas dari Lampiran F Deklarasi Hong Kong yang menyatakan bahwa "anggota-anggota negara maju harus, dan anggota-anggota negara berkembang menyatakan diri mereka dalam posisi untuk melakukannya harus: (b) Memastikan bahwa ketentuan asal barang khusus yang berlaku untuk impor dari LDC transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar."¹¹

- 1 Pidato kunci yang di sampaikan oleh Michael Froman USTR di WTO Public Forum on Innovation and the Global Trading System yang diadakan di Jenewa. 1 Oktober 2013. Terakhir di lihat 18 Oktober 2013. <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/speeches/transcripts/2013/september/froman-wto-innovation-global-trade>
- 2 Fasilitas Perdagangan WTO: Saatnya Untuk Panen Awal. Pernyataan bersama Joint Conseil québécois du commerce de détail (Kanada), Euro Commerce (Eropa), Foreign Trade Association (Eropa), National Retail Association (AS) dan Retail Council of Canada http://www.wto.org/english/forums_e/public_forum12_e/session24tradfa_joint_stat_e.pdf
- 3 Pidato Pascal Lamy di hadapan Chitaggong Chamber of Commerce di Bangladesh. 1 Februari 2013. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ed70bf36-f804-11da-9481-0000779e2340.html>
- 4 Pidato Pascal Lamy di hadapan Chitaggong Chamber of Commerce di Bangladesh. 1 Februari 2013. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ed70bf36-f804-11da-9481-0000779e2340.html>
- 5 Pidato of DG Roberto Azevedo dihadapan Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in Delhi, India. 7 Oktober 2013. Terakhir di lihat 18 Oktober 2013. http://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra3_e.htm
- 6 Annex D of the Doha Work Programme. 2004. Terakhir di lihat 23 Oktober 2013 http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_31july04_e.htm
- 7 Annex D of the Doha Work Programme. 2004. Terakhir di lihat 23 Oktober 2013 http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_31july04_e.htm
- 8 Pidato kunci yang di sampaikan oleh Michael Froman USTR di WTO Public Forum on Innovation and the Global Trading System yang diadakan di Jenewa. 1 Oktober 2013.
- 9 South Centre paper on Trade Facilitation: Implementation Cost Issue. Juli 2012.
- 10 Communication of Nepal on Behalf of the LDC Group on LDC package for Bali. Submitted to the trade negotiations committee 31 May 2013.
- 11 Communication of Nepal on Behalf of the LDC Group on LDC package for Bali. Submitted to the trade negotiations committee 31 May 2013. Addendum submitted September 2013.

Proposal Ketahanan Pangan India: Satu Langkah yang Salah dapat Mengancam Ketahanan Pangan India Selamanya

Salah satu bagian kunci dari Paket Bali yang akan menentukan hasil dari Pertemuan tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali adalah Proposal India, mengatasnamakan G-33, mengenai penimbunan bahan pangan bagi kepentingan program ketahanan pangan. Proposal ini bertujuan untuk memperluas "ruang kebijakan" dengan merubah Kesepakatan tentang Pertanian (AOA)¹ dalam rangka memastikan ketahanan pangan bagi sebagian besar rakyat India yang lapar. Proposal ini juga mengizinkan pemerintah India untuk terus membeli gandum dan beras dengan Harga Subsidi Minimal (Minimum Support Price-MSP) dari produsen miskin-berpendapatan rendah (mencakup kurang lebih 98.97 persen² dari jumlah petani India yang mempunyai lahan produksi kurang dari sepuluh hektar). Para petani ini masih bertahan di bidang pertanian karena pemerintah membeli hasil pertanian mereka di bawah program ketahanan pangan (penyaluran umum). Namun, para petani miskin dan penduduk lapar India ini dianggap sebagai rintangan utama untuk suksesnya penyelesaian Pertemuan tingkat Menteri di Bali nanti. Negara-negara besar seperti Amerika

Serikat dan Kanada tidak siap menerima tuntutan G-33 untuk merubah peraturan-peraturan di Kesepakatan tentang Pangan (AOA). Mereka tidak siap untuk mengizinkan Negara-negara berkembang seperti India memotong batas subsidi minimumnya (*de-minimis*), dari 10 persen total produksi sebagaimana referensi Batas Harga eksternal (ERP) yang berlaku selama 1986-88.

Proposal India menerangkan bahwa pada perundingan Putaran Doha ada kemajuan-kemajuan besar yang telah dicapai, yaitu mengenali ada keprihatinan serius mengenai ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Beberapa tahun ini masalah ketahanan pangan menjadi keprihatinan global dan perlu ada tindakan mendesak untuk dilakukan. Proposal ini juga meminta untuk beberapa elemen dalam Perbaikan Isi Rancangan Modalitas Perdagangan (TN/AG/W/4/Rev.4) tanggal 6 Desember 2008, berkaitan dengan ketahanan pangan untuk dibahas dan diputuskan pada pertemuan tingkat Menteri di Bali sesuai ayat 47 Deklarasi Pertemuan tingkat Menteri di Doha (DMD). Karena itu, India ingin penghapusan kalimat terakhir pada catatan kaki nomor 5 di paragraph 3 mengenai Kesepakatan tentang Pertanian (AOA) lampiran 2 tentang Penimbunan Persediaan Barang Umum untuk tujuan ketahanan pangan. "*Untuk kepentingan paragraph 3 pada lampiran ini, program-program pemerintah tentang penimbunan persediaan barang dengan tujuan ketahanan pangan di Negara-negara berkembang, yang dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan kriteria atau panduan yang dikeluarkan*

De Minimis (Artikel 6.4):

Di bawah ketentuan Kesepakatan De Minimis, tidak ada persyaratan untuk mengurangi dukungan atau tunjangan dalam negeri akan penyimpangan perdagangan di mana keseluruhan nilai dukungan tidak melebihi batas tertentu atau harga maksimum. Dalam kasus Negara-negara berkembang, harga maksimum de minimis adalah 10 persen

secara resmi harus dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan ayat ini, termasuk program-program yang berada di bawah jenis-jenis persediaan pangan apa yang dibutuhkan untuk kepentingan ketahanan pangan. Dan dilepas dengan harga administratif, diadakan karena perbedaan antara harga pendapatan dan harga rujukan eksternal di dalam Ukuran Penambahan Bantuan (Aggregate Measurement of Support - AMS). Harga referensi eksternal yang sudah pasti ditentukan pada Putaran Uruguay. Ini adalah rata-rata harga f.o.b (pembebasan biaya kirim dari tempat pertanian sampai pada pengiriman) yang telah dimodifikasi oleh Negara seperti India untuk hasil produksi tahun 1986-1988 dan ini digunakan sebagai patokan untuk menghitung tingkat dukungan harga pasar sebuah Negara, bahkan sampai hari ini. Dikarenakan lamanya waktu yang sudah berlalu, harga ini lebih rendah dari harga saat ini.

Karena hal inilah mengapa G-33 mengusulkan untuk menghapus "perbedaan antara harga perolehan dan referensi harga eksternal sangat diperhitungkan di Ukuran Penambahan Bantuan (AMS)" dan menggantinya dengan "Namun, perolehan akan pembelian barang seperti pangan oleh Anggota dari Negara berkembang dengan tujuan untuk mendukung produsen miskin atau berpendapatan rendah tidak diharuskan untuk dihitung dalam Ukuran Penambahan Bantuan (AMS)."

Lebih jauh lagi, proposal G-33 berikut menuntut penambah ayat kedalam catatan kaki Kesepakatan tentang Pertanian (AOA) no 6 pada paragraph 2 lampiran 2. Untuk tujuan paragraph 3 dan 4 dari lampiran ini, "pembelian bahan makanan pada harga subsidi ketika barang-barang produksi umum datang dari produsen miskin dan berpendapatan rendah di Negara-negara berkembang dengan tujuan untuk melawan kelaparan dan kemiskinan, sekaligus" pengadaan bahan pangan pada harga disubsidi.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin kota dan pedesaan di Negara berkembang secara berkala dengan

Green Box (Annex 2):

Hal ini mengacu pada kebijakan-kebijakan atau ukuran-ukuran dukungan yang mana mempunyai dampak minimal terhadap perdagangan dan oleh karena itu, bebas dari komitmen pengurangan.

Paragraph 3: Penimbunan umum untuk kepentingan ketahanan pangan:

Pengeluaran (pendapatan) dalam hubungannya dengan penimbunan dan menahan persediaan hasil-hasil yang mana membentuk sebuah bagian yang utuh program akan ketahanan pangan yang dikenali didalam perundang-undangan negara. Hal ini dapat berupa bantuan pemerintah kepada tempat penyimpanan hasil-hasil dari pihak swasta yang menjadi bagian dari program sejenis.

Isi dan penimbunan persediaan harus sesuai dengan target berhubungan untuk kepentingan ketahanan pangan. Proses dari akumulasi hasil dan pembuangan harus transparan secara financial. Pembelian pangan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan harga pasar domestik terkini dan penjualan dari persediaan ketahanan pangan harus dilakukan tidak kurang dari harga pasar domestik terkini untuk produk dan pertanyaan akan kualitas.

harga yang masuk akal, yang mana tetap pada kepatuhan dengan ayat-ayat dalam paragraph diatas.

Negara berkembang seperti India terus menjadi korban dari peraturan bias akan Kesepakatan tentang Pertanian (AOA) yang dibentuk dua dekade lalu sebagai bagian dari transaksi rahasia antara Uni Eropa dan Amerika Serikat (Blair House Accord 1993) yang mana membentuk sebuah Kesepakatan tentang Pertanian (AOA) multilateral yang hanya cocok bagi negara maju. Perjanjian itu juga memberikan mereka kesempatan

untuk memperluas ruang kebijakan mereka untuk melanjutkan subsidi perdagangan menyimpang mereka di bidang pertanian hingga saat ini, dari satu bentuk ke bentuk lainnya. India, di mana sepertiga masyarakat lapar berada dan hidup, ketakutan untuk ditarik ke dalam perselisihan perdagangan oleh pemberi subsidi besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa jika mereka memperluas program ketahanan pangannya di bawah legislasi ketahanan pangan terkini, yang akan menghasilkan pemotongan batas 10 persen dari subsidi perdagangan menyimpang. Karena dari itu proposal India yang disampaikan oleh Indonesia mewakili G-33 pada pertemuan Sesi Khusus Komisi Pertanian pada tanggal 13 November 2012 mengusulkan (WTO document JOB/AG/22), keinginan akan adanya ayat-ayat tentang penimbunan persediaan barang umum untuk kepentingan ketahanan pangan, hal ini sudah termasuk dalam rancangan modalitas pada 6 Desember 2008 lalu, untuk diangkat sebagai keputusan resmi pada Konferensi Tingkat

Menteri ke-9 WTO di Bali bulan Desember 2013 nanti. Proposal ini menuntut peraturan-peraturan yang lebih leluasa untuk subsidi pertanian di 'Kotak Hijau' (Green Box) WTO—pihak-pihak yang dibebaskan dari batas harga tertinggi atau pengurangan ikatan dengan dasar bahwa mereka tidak melakukan penyimpangan batas perdagangan minimum.

Peraturan-peraturan WTO yang Bias

Objektif kunci dari proposal India adalah ketahanan pangan dan hal ini harus didasari pada pembelian hasil-hasil pertanian dari sumber produsen miskin dan berpenghasilan rendah pada harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah (atau "harga administratif") yang akan menawarkan dukungan harga terhadap produsen, contoh kasus MSP di India. Dukungan harga ini tidak dapat dianggap sebagai pembatasan dukungan pokok perdagangan menyimpang, untuk jumlah



"*de-minimis*" hingga 10 persen dari nilai keseluruhan produksi. Jika hasil-hasil sebuah pertanian untuk program ketahanan pangan dihasilkan pada harga pasar yang lazim, hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai dukungan penyimpangan perdagangan domestik yang juga di sebut sebagai "Kotak Kuning (Yellow Box)" atau Aggregate Measurement of Support³ (Ukuran Penambahan Bantuan - AMS)

Di antara 100 negara-negara berkembang di WTO, hanya 17 yang mempunyai akses terhadap Ukuran Penambahan Bantuan (AMS) sementara Negara-negara berkembang lainnya, dan juga India, telah menyatakan nol terhadap Ukuran Penambahan Bantuan (AMS) di

Ayat 4 (Halaman 2): Bantuan Pangan Domestik

Pengeluaran (atau pendapatan mula-mula) hubungannya dengan ketentuan akan bantuan pangan domestik kepada golongan penduduk yang membutuhkan.

Kelayakan untuk menerima bantuan pangan harus tunduk pada criteria yang secara jelas ditetapkan berhubungan dengan sasaran nutrisi. Bantuan tersebut harus dalam bentuk penyediaan bahan pangan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan atau atau penyediaan sarana untuk mengijinkan penerima untuk membeli makanan secara langsung di pasar maupun pada harga subsidi. Pembelian bahan makanan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan pada harga pasar terkini dan proses administrasi harus dilakukan secara terbuka.

Catatan kaki 6:

Untuk kepentingan dari ayat 3 and 4 dihalaman ini, pemberian bahan makanan pada harga subsidi dengan sasaran untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perkotaan dan desa miskin secara rutin pada harga yang maksud akal haruan untuk selaras dengan ketentuan pada ayat ini.

Putaran Pembahasan Uruguay atau pada saat akses mereka. Hal ini berarti bahwa sebagian besar Negara berkembang mempunyai akses pada 10 pesen berupa produk khusus *de-minimis* dan 10 persen bukan-produk *de-minimis*, juga sebagaimana pasal 6.2 dari Kesepakatan tentang Pertanian (AOA) yang mana meliputi subsidi masukan dan investasi kepada produsen miskin dan berpenghasilan rendah. Dan jika pemerintah ingin menyediakan batuan harga kepada peghasil-penghasil mereka, menurut Kesepakatan tentang Pertanian (AOA), Lampiran 3 Paragraph 8, subsidi tersebut harus di informasikan kepada WTO sebagai Ukuran Penambahan Bantuan (AMS). Bagi Negara berkembang dengan Ukuran Penambahan Bantuan (AMS) nol seperti India, angka tersebut tidak dapat melebihi 10% produk khusus *de-minimis* (ketika batuan berupa produk khusus).

Bantuan tersebut yang di informasikan kepada WTO akan menjadi selisih antara harga administratif dan referensi harga eksternal yang ditetapkan, dikalikan sesuai dengan isi. Namun, perangkap dalam bahasa pada lampiran 3 paragraf 8 Kesepakatan tentang Pertanian (AOA) ialah bukan hanya isi yang benar-benar diperoleh pemerintah, tetapi seluruh produksi yang "layak" untuk menerima bantuan serupa. Artinya, walaupun pemerintah India hanya memperoleh sejumlah kecil, mereka harus menghitung bantuan Ukuran Penambahan Bantuan (AMS) seolah-olah mereka diberikan bantuan harga untuk seluruh produksi dari produk tersebut (jumlah 'layak'). Dengan pembatasan ini, beberapa Negara berkembang berada di dalam bahaya untuk mencapai atau melebihi batas yang diijinkan dari 10 persen produk khusus *de-minimis*.

Melihat krisis pangan pada tahun 2007-2008, ketidakstabilan harga-harga pangan, dan ketidakpastian pasokan di pasar internasional (karena berbagai macam spekulasi produksi dampak dari perubahan iklim dan juga spekulasi keuangan), sangatlah penting bagi Negara-negara berkembang untuk meningkatkan produksi pangan mereka. Untuk melakukan ini, subsidi harga kepada petani produsen yang miskin dan berpenghasilan

rendah sangat penting. Hal ini seperti ini sudah dan akan terus menjadi, bagaimana Negara maju yang telah berhasil di proses pembangunan dan industrialisasi mereka. Untuk membantu petani produsen yang berpenghasilan rendah atau miskin di Negara-negara berkembang, proposal G-33 ini ditujukan untuk mengusahakan pembentukan bantuan harga untuk petani-petani dengan kondisi tersebut dengan perlakuan khusus dan pengecualian karena perbedaan (sebagaimana dinyatakan pada pasal 6.2). Proposal G-33 akan menghilangkan kesenjangan dan memasukan sedikit keadilan pada aturan-aturan Kesepakatan tentang Pertanian (AOA) antara Negara-negara maju dan berkembang. Banyak Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menyediakan bantuan penghasilan bagi petani mereka di bawah "Kotak Hijau" yang tidak dikenakan tingkat harga maksimum apapun. Mereka bahkan tidak menurunkan keseluruhan bantuan mereka dengan mengubah bantuan Ukuran Penambahan Bantuan (AMS) ke Kotak Hijau. Negara berkembang yang menyatakan nol Ukuran Penambahan Bantuan (AMS) diberitahukan bahwa mereka harus menjaga Ukuran Penambahan Bantuan (AMS) pada posisi nol selamanya. Mereka tidak dapat menyediakan bantuan tambahan di luar *de-minimis* mereka dan yang disediakan oleh artikel, walaupun tujuan dari hal ini untuk memastikan ketahanan pangan bagi rakyat dan kelasungun hidup petani-petani kecil dan terpinggirkan. Karena itulah India mencoba untuk mengubah peraturan-peraturan tersebut; agar ketika proses pembelian hasil pangan dari petani dapat masuk dalam Kotak Hijau.

Beberapa Negara maju, terutama Amerika Serikat, adalah penentang utama dari proposal G-33 ini, walaupun mereka terus mendapatkan keuntungan dari peraturan-peraturan WTO yang tidak adil dan bias, yang mana mengijinkan Negara maju untuk merubah subsidi raksasa mereka ke dalam Kotak Hijau untuk menghindari hukuman. Negara-negara maju tidak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dan atau menghilangkan subsidi raksasa mereka, yang mana sebagian besar ditujukan untuk bisnis pertanian mereka, namun,

**Lampiran 3: Ayat 8:
Bantuan Harga Pasar:**

Bantuan harga Pasar harus dihitung menggunakan jarak yang ada antara referensi luar yang ditetapkan dan harga administratif yang diterapkan dikalikan dengan jumlah produksi yang memenuhi syarat untuk menerima harga adminintrative yang diterapkan. Pembayaran anggaran dilakukan untuk memelihara jarak ini, seperti pembelian atau biaya penyimpanan, tidak dapat dimasukkan dalam AMS.

mereka tidak tahu malu membatasi Negara berkembang yang jumlah penduduk yang kurang gizi dan lapar untuk menaikkan subsidi yang ditujukan untuk ketahanan pangan. Amerika Serikat memberikan subsidi sejumlah 94 miliar dolar pada tahun 2011, tetapi duta besar Amerika Serikat untuk WTO, Michael Punke, dalam pertemuan Pertemuan Komisi Negosiasi Perdagangan WTO di Jenewa, pada bulan April 2013, mengatakan "proposal G-33 tentang penimbunan pangan yang diajukan oleh India membingungkan dan menguatirkan. Sejak Putaran Perundingan Doha, Negara-negara berkembang menyatakan secara jelas bahwa mereka melihat disiplin pengurangan subsidi penyimpangan perdagangan pertanian sebagai salah satu tujuan mendasar dari putaran perundingan tersebut. Bukannya membentuk disiplin baru untuk mengurangi subsidi pertanian, proposal G-33, menggambarkan sebuah langkah mundur dari disiplin Putaran Perundingan Uruguay yang sudah ada—menciptakan celah baru bagi kemungkinan subsidi penyimpangan perdagangan yang tidak terbatas"⁴

Namun faktanya Kotak Hijau dalah sebuah celah yang besar di dalam WTO, yang mana tidak memberikan batasan kepada Negara-negara seperti Amerika Serikat untuk menggunakannya bagi kepentingan mereka dengan merubah sebagian besar subsidi penyimpangan perdagangan dari Kotak Kuning ke Kotak Hijau, termasuk subsidi tidak langsung berkaitan dengan proses produksi

atau yang mengikat pada perlindungan lingkungan, jadi terlihat dalam kertas seperti mereka mengurangi bantuan mereka tapi yang sebenarnya terjadi adalah subsidi terus dinaikan. Amerika Serikat adalah pihak yang paling kritis terhadap proposal India, tetapi pengeluaran domestik mereka untuk kupon makanan naik sangat tajam, dan subsidi pertanian mereka mencapai rekor baru yaitu 130.3 miliar dolar di tahun 2010. Dari jumlah ini, 120.5 miliar dolar dilaporkan sebagai pembayaran Kotak Hijau. Menurut hitungan pemerintah Amerika, bantuan pangan domestik—kategori ini termasuk kupon bahan makanan—mewakili hampir seperdelapan dari total pengeluaran Kotak Hijau di tahun 2010, yaitu 94.9 miliar dolar.⁵

Bandingkan subsidi besar untuk bantuan pangan di Amerika, subsidi India dihitung sekitar 9.4 miliar dolar⁶ pada tahun 2010 dari keseluruhan bantuan dalam bentuk beras dan gandum—jumlah bantuan Amerika Serikat 10 kali lebih besar dari India. Ada sekitar 80 penerima bantuan di Amerika Serikat sementara di India 475 juta, atau 6.3 lebih besar dibandingkan dengan Amerika.⁷ Akan tetapi, setelah penerapan Undang-undang Ketahanan Pangan Nasional secara menyeluruh tahun 2013, yang mana 67 persen dari populasi dunia berhak mendapatkan keuntungan, subsidi pangan di India diharapkan untuk memotong angka 10 persen. Hal ini akan menjadikan India terbuka bagi hukuman di bawah peraturan WTO, yang mana dalam kasus ini menghukum negara-negara yang bukan pemberi subsidi terbesar ketika peraturan ini diberlakukan dan mengikat mereka di tingkat 10 persen subsidi de minimis.

Program Ketahanan Pangan Nasional

Undang-undang Ketahanan Pangan 2013 menjamin hak akan pangan kepada satu pertiga penduduk India (atau 820 juta orang⁸, dengan level kemiskinan) dengan memberikan mereka lima kilogram beras atau gandum atau sereal dengan harga 3,

Artikel 6.2:

Sesuai dengan Kesepakatan Tinjauan Tengah Tahun mengenai ukuran bantuan pemerintah, secara langsung maupun tidak, untuk mendorong pembangunan pertanian dan pedesaan yang adalah bagian integral dari program pembangunan negaranegara berkembang, subsidi investasi yang mana secara umum tersedia untuk wilayah pertanian negara berkembang dan subsidi sarana pertanian yang tersedia bagi produsen berpenghasilan rendah dan miskin sumber daya untuk anggota dari negara berkembang harus dibebaskan dari komitmen-komitmen bantuan domestik yang akan dinyatakan sebaliknya akan berlaku akan ukuran tersebut, sebagai bantuan domestik untuk produsen di negaranegara berkembang untuk mendorong diversifikasi penanaman tanaman narkotik ilegal. Bantuan domestik yang tidak dapat diharuskan untuk dimasukkan dalam kalkulasi untuk Anggota pada Total AMS Terbaru.

2, 1 rupee. Hal ini membutuhkan pengadaan sekitar 62 juta ton biji-bijian pertahun dari sumber petani produsen berpendapatan rendah—miskin, pada biaya 130.000 crore rupee⁹ (atau \$21.13 miliar dolar¹⁰) bantuan pemerintah, hanya satu perlima pengeluaran Kotak Hijau Amerika Serikat untuk kupon bahan makanan. Laporan Bank Dunia terbaru¹¹ menunjukkan bahwa rekening India untuk satu pertiga penduduk miskin dunia, hidup kurang dari \$1.25 (sekitar Rs 65) per hari. Laporan Arjun Sengupta¹² memperkirakan 77 persen rakyat India (sekitar 863 juta jiwa) hidup kurang dari 20 rupee perhari (sekitar 0.05 dolar perhari) berdasarkan data periode tahun 1993-94 dan 2004-05. Kesamaan dengan komisi NC sexena yang dibentuk oleh Menteri Pembangunan Desa meperkirakan bahwa 50 persen masyarakat India hidup di bawah garis kemiskinan jika diitung dengan jumlah kalori.¹³

Menurut Petunjuk Baru Internasional Multi-dimensi Kemiskinan, yang dikembangkan oleh Inisiasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Manusia Oxford untuk Laporan Pemberdayaan Manusia 2010 (HDR), juga menunjukkan bahwa 64 juta orang atau 55 persen penduduk India miskin.¹⁴ Dalam 12 tahun ini kemiskinan di India semakin buruk. Sebagaimana Laporan UNDP soal Pemberdayaan Manusia tahun 2001, India berada pada posisi 115 dari 162 negara, tapi pada tahun 2011 peringkat India turun pada posisi 134 dari 162 negara. Lags India berada dibelakang tetangga-tetangga seperti, Bangladesh, Bhutan dan Nepal pada beberapa indikator sisi lain. Menurut HDR tahun 2011, di bawah tingkat lima kematian, adalah 66 per 10.00 kelahiran di 2009 di India dibandingkan dengan 48 di Nepal dan 52 di Bangladesh.¹⁵

Kenyataan akan situasi kemiskinan dan kemiskinan di India memerlukan sebuah program ketahanan pangan yang konsisten dengan kekhawatiran pembangunan bagi masyarakat India. Maka dari itu sangat mendesak bagi India dan Negara berkembang lainnya untuk berusaha untuk proposal penimbungan pangan untuk

kepentingan ketahanan pangan disetujui oleh Pertemuan Tingkat Menteri untuk melanjutkan memberikan subsidi seperti ini di dalam konstitusi mereka ini di masa depan. Tetapi Amerika Serikat sudah menolak proposal G-33 untuk mengubah Peraturan Kesepakatan tentang Pertanian (AOA) yang ada di dalam text "dapat meremehkan peraturan subsidi yang sudah ada." Bukannya memberikan solusi permanen, Amerika Serikat telah siap memberikan kepada India dan Negara-negara G-33, sebuah "Pasal Perdamaian". Sebuah "Pasal perdamaian" adalah ketika sebuah Negara sepakat untuk tidak membawa masalah mereka di WTO terhadap satu sama lain pada suatu masalah, tetapi mereka tidak mengubah peraturannya sama sekali. Sering kali Pasal perdamaian adalah sebuah pasal yang bersifat sementara hanya untuk beberapa tahun dan secara otomatis akan kadaluarsa kecuali secara aktif terus diperbaharui. Ini adalah sebuah langkah cerdas yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan keputusan bersama akan bagian penting lain pada paket Bali, contoh kesepakatan tentang Fasilitasi Perdagangan yang mengharuskan Negara-negara untuk berinvestasi di wilayah



infrastruktur untuk mempercepat izin bea-cukai dan membantu perdagangan global. Tetapi fasilitasi perdagangan ini tidak lain hanya untuk memfasilitasi import dan memerlukan meningkatkan infrastruktur di perbatasan, pelabuhan dan prosedur bea-cukai untuk mendorong proses import sebanyak-banyaknya dari Negara berkembang.

Sampai pada minggu pertama bulan Oktober 2013, India tetap pada pendirian bahwa sebuah kesepakatan Multilateral untuk memfasilitasi perdagangan melalui ukuran-ukuran wajib seperti izin yang terikat waktu, infrastruktur yang lebih baik dan kurangnya proses dokumentasi tidak dapat dicapai tanpa perjanjian bersama pada batas subsidi yang lebih bebas untuk memungkinkan Negara berkembang mencapai komitmen ketahanan pangan mereka. Jika proposal G-33 dari kelompok Negara-negara berkembang tentang ketahanan pangan tidak dimajukan, kesepakatan fasilitasi perdagangan (didorong oleh Negara berkembang) tidak akan pernah terjadi, menurut Rajiv Kher, pimpinan negosiator India di WTO bulan Juli tahun ini.¹⁶ Akan tetapi, dua bulan kemudian di bulan Oktober, telah terjadi perubahan pada posisi India, ketahanan pangan dan fasilitasi perdagangan. Direktur Jendral WTO, Azevedo, mengunjungi Delhi dan menegaskan jalan tengah untuk menyusun paket Bali dengan batuan India. Hal ini menjadi perubahan yang sangat mengganggu untuk India dan jika India tetap pada posisi baru ini, akan berpotensi pada gagalnya program ketahanan pangan yang ambisius di bawah undang-undang 2013.

Setelah kunjungan Azevedo, sepertinya India siap untuk menetap pada solusi jangka pendek akan masalah seputar legislasi ketahanan pangan mereka dan setuju pada 'pasal perdamaian' yang memberikan penundaan dari hukuman dalam peristiwa ketika tingkat subsidi dilanggar. India kemungkinan besar akan sepakat pada tuntutan Negara berkembang untuk membentuk perjanjian bersama yang akan memfasilitasi perpindahan pangan lintas perbatasan.

Dikarenakan Pasal Perdamaian ini akan jatuh tanpa ada perubahan perubahan akan Kesepakatan tentang Pertanian (AOA), proyek impian India, program ketahanan pangan nasional, akan terancam. Subsidi yang dilakukan oleh Negara berkembang semakin meningkat, akan mulai terlihat peningkatan pada import pangan, setelah kesepakatan akan fasilitasi perdagangan akan mendesak petani dalam negeri kehilangan bisnis mereka untuk memberi makan penduduk miskin mereka pada saat yang sama membayar harga yang adil kepada petani mereka di bawah Kotak Hijau (Green Box). Seperti Negara maju, India dan Negara berkembang lainnya mempunyai kelonggaran dan zona nyaman untuk merubah-rubah subsidi mereka untuk kepentingan rakyat dan petani mereka.

- 1 Kesepakatan tentang Pertanian (AOA), yang mana membentuk bagian dari Kesepakatan Putaran Uruguay, yang ditandatangani oleh Negara-negara anggota termasuk India pada bulan April 1994 dan beroperasi dengan didirikannya WTO sejak 1 Januari, 1995.
- 2 Notifikasi terbaru India kepada WTO mengenai subsidi pertanian, dokument G/AG/N/IND/7 9 Juni 2011
- 3 Ukuran Penambahan Bantuan (AMS) yang sarana berarti pengukur nilai agregate akan bantuan domestik atau subsidi yang diberikan kepada setiap kategori produk. Setiap anggota WTO telah melakukan perhitungan untuk tingkat AMS yang dapat diterapkan. AMS terdiri dari dua bagian — produk khusus dan bukan-produk khusus.
- 4 <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/speeches/transcripts/2013/april/amb-punke-statement-wto-tnc>
- 5 <http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/146491/>
- 6 <http://www.twinside.org.sg/title2/wto.info/2013/twninfo131005.htm>
- 7 http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/pfor_03oct13_e.htm
- 8 http://zeenews.india.com/news/nation/rajya-sabha-passes-national-food-security-bill-by-voice-vote_873721.html
- 9 Satu crore = 10 juta
- 10 Pada nilai terkini 61,50 rupee untuk satu dolar.
- 11 http://articles.economicstimes.indiatimes.com/2013-04-18/news/38647031_1_extreme-poverty-poverty-line-world-development-indicators
- 12 Laporan tentang Syarat-syarat mengenai Mata Pencarian dan Promosi Dunia dalam Sektor yang Tidak Terorganisir oleh Komisi Nasional, Agustus 2007;
- 13 <http://www.thehindu.com/business/Economy/calorie-intake-criterion-puts-50-per-cent-indians-below-poverty-line/article22587.ece>
- 14 http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-07-15/india/28281806_1_child-mortality-nutrition-human-development-initiative
- 15 Laporan Pembangunan Manusia 2011, (Table: 9); http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf
- 16 <http://www.thehindubusinessline.com/economy/hike-in-food-subsidy-limits-vital-for-trade-facilitation-pact-at-wto-india/article4967106.ece>

Perubahan Geopolitik Perdagangan: Aktor Lama dan Baru dalam Kemunduran

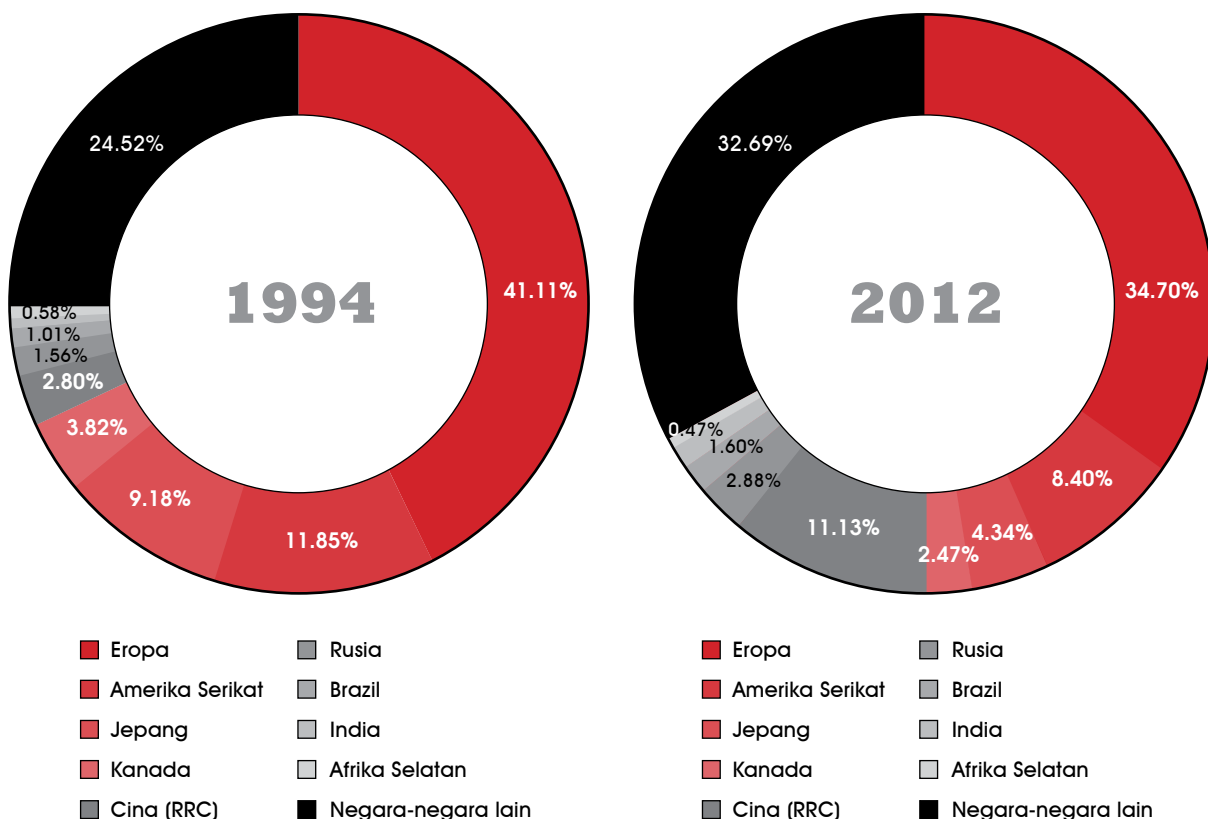
Pada saat Organisasi Perdagangan Dunia (yang kemudian disebut dengan WTO) dibentuk, sebagian besar negosiasi perdagangan ditentukan oleh Amerika, Eropa, Jepang, dan Kanada, dan perundingan antar aktor-aktor tersebut dipaksakan terhadap negara-negara berkembang. Pada saat itu, Cina dan Rusia bukan anggota WTO. Negosiasi perdagangan kemudian dalam sebuah mekanisme, merefleksikan pembagian bahwa negara-negara ini sudah ada dalam perdagangan global. Negara yang tergolong dalam empat besar (Amerika, Eropa, Jepang dan Kanada) terhitung sebanyak 68 persen dari keseluruhan ekspor di tahun 1994. Negara kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, Kanada, dan Afrika Selatan)-

yang tidak hadir sebagai aliansi dan kemudian hanya terhitung 6.5 persen dari total ekspor.

Kemunculan dan Perpecahan antara Aktor lama dan Baru

Dalam eksistensinya selama 18 tahun, situasi WTO telah berubah. Cina dan akhir-akhir ini Rusia telah menjadi anggota WTO. Saat ini, Anggota empat besar yang lama telah mengurangi bagiannya menjadi 49.9 persen dari ekspor barang-barang global, sementara negara-negara BRICS saat ini mewakili 17.4 persen dari pasar komoditas global.

Ekspor Barang-barang Global



Porsi negara-negara BRICS bahkan lebih besar, jika diperhitungkan besarnya sekitar 70 persen dari perdagangan Eropa merupakan perdagangan dalam Uni Eropa.

Hingga tahun 2011, BRICS memiliki peningkatan yang sangat penting dalam perdagangan, tapi di tahun 2012, pertumbuhan negara-negara BRICS mulai menurun, dengan situasi yang semakin memburuk di tahun 2013. Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan saat ini merupakan eksportir bahan-bahan mentah dan produk dasar. Cina dengan cerita yang berbeda telah menjadi eksportir barang teratas di dunia. Pada saat terjadinya "komoditas dengan nilai tambah", penguasa terbesar dalam ruang perdagangan dunia sudah pasti Cina – lebih dari negara BRICS- sementara itu aktor lama yang tergolong empat besar dalam masa penurunan.

Kompetisi dalam Sebuah Konteks Penurunan

18 tahun WTO, kemunculan WTO tidak hanya membahas tentang aktor yang telah mengalami perubahan, tapi juga dalam konteks perdagangan global dan investasi. Hingga tahun 2007, perdagangan global telah meningkat tiga kali dari tahun 1994, namun sejak bermulanya krisis, tingkat pertumbuhan perdagangan global telah berhenti. Selain itu, arus modal global pada saat ini hanya sepertiga dari 11 triliun dolar hingga 2007.

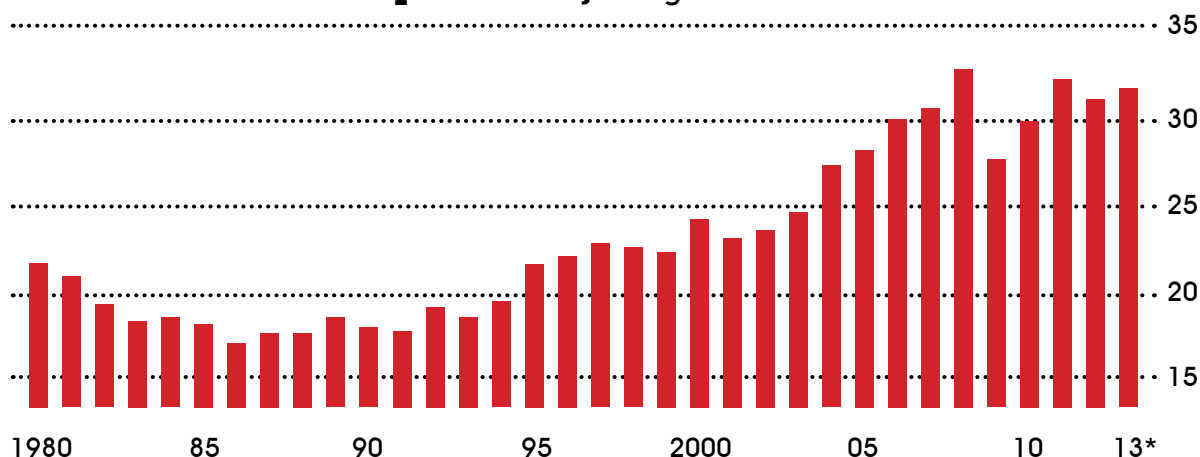
Beberapa analis meyakini bahwa penurunan ini hanya bersifat sementara. Namun lainnya, berpikir bahwa kondisi ini merupakan keadaan normal yang baru. Hampir semua pihak setuju bahwa perdagangan global mungkin akan berjalan lambat selama bertahun-tahun. Dalam konteks ini, apa strategi yang dimainkan oleh aktor yang berbeda-beda tersebut?

Perbedaan Strategi untuk Korporasi Aktor-aktor

Agenda perdagangan yang disepakati oleh BRICS di tahun 2012 difokuskan pada: 1) mempromosikan "perdagangan dan investasi antar negara BRICS" "produk yang bernilai tambah tinggi" 2) Pembentukan sebuah "Bank Pembangunan Baru BRICS" untuk "infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan di BRICS dan kemunculan ekonomi lainnya serta negara-negara berkembang," dan 3) Pendirian sebuah *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) atau dalam Bahasa Indonesia disebut "Susunan Cadangan Kontingen antar negara-negara BRICS" dengan biaya permulaan sebesar 100 miliar dolar untuk "membantu mencegah negara BRICS dari tekanan likuiditas jangka pendek, menyediakan bantuan antar sesama dan selanjutnya memperkuat stabilitas finansial.

Strategi perluasan perdagangan dan investasi BRICS sebagian besar dijalankan melalui alokasi sumber public dalam infrastruktur, industri

Ekspor Dunia, sebagaimana % GDP



Sumber: IMF; McKinsey Global Institute; *The Economist*

*Perkiraan

ekstraktif dan proyek lainnya di negara-negara BRICS serta negara berkembang lainnya untuk menciptakan permintaan terhadap korporasi mereka demi tujuan mendapatkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya alam.

Strategi dari 4 negara besar lama yaitu untuk mendorong liberalisasi perdagangan yang lebih melalui negosiasi perdagangan bebas seperti Kerjasama TransPasifik (TPP - *TransPacific Partnership*), Area Pasar Bebas TransAtlantik (TAFTA - *TransAtlantic Free Trade Area*), dan area perdagangan bebas lainnya sebagai bentuk penyeimbangan tandingan terhadap perluasan perdagangan Cina dan mendirikan standar baru liberalisasi perdagangan yang lebih mendalam terhadap seluruh negara.

Cina menggabungkan kedua strategi dan telah menegosiasikan Area Pasar Bebas dengan banyak negara yang memiliki kerjasama dengan Area Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa, dan Amerika. Cina menggabungkan sebuah strategi perdagangan bebas yang "terkontrol", "terarah", dan "terbatas" dengan kebijakan intervensi negara untuk memperluas ekspansi mereka di seluruh dunia.

Dalam konteks yang lebih kecil, kompetisi semakin memburuk, tapi dibalik semua hal yang ditutupi, sebagian besar PT. Swasta dan perusahaan-perusahaan transnasional melakukan bisnis bersama, di seluruh dunia. Pemusatan modal semakin meningkat dan begitu juga dengan ketidaksetaraan. Pihak yang dirugikan dari strategi yang berbeda ini demi mempromosikan perusahaan-perusahaan mereka adalah manusia dan alam.

Implikasi terhadap WTO

Ketika dikaitkan dengan WTO, kedua kelompok negara BRICS dan "empat negara besar" lama menginginkan semacam keluaran dari Konferensi Menteri ke 9 di Bali untuk memberikan tanda positif terhadap pasar yang lambat. Keseluruhan dari mereka telah menyetujui untuk mengenyampingkan persetujuan "pelaksanaan tunggal" dari *Doha Round* untuk menghindari kebuntuan. Semua anggota telah membawa

dari kematian unsur "Isu Singapura" yang ditolak di tahun 2003; Fasilitas Perdagangan.

Amerika Serikat sedang mendorong demi persetujuan fasilitas perdagangan yang lebih ambisius. India bersedia menerima rekonsiliasi damai untuk implementasi subsidi bagi petani kecil yang melangkah melebihi dari apa yang ditetapkan WTO saat ini. Brazil, yang saat ini memimpin WTO, ingin menunjukkan bahwa mereka mampu untuk bergerak ke perundingan lanjutan. "Ada sebuah pesan terhadap WTO," dikatakan oleh Direktur Umum Brazil WTO, "pertumbuhan perdagangan yang lamban di dua tahun terakhir memaksakan adanya kebutuhan untuk membuat sebuah kemajuan dalam negosiasi multilateral."

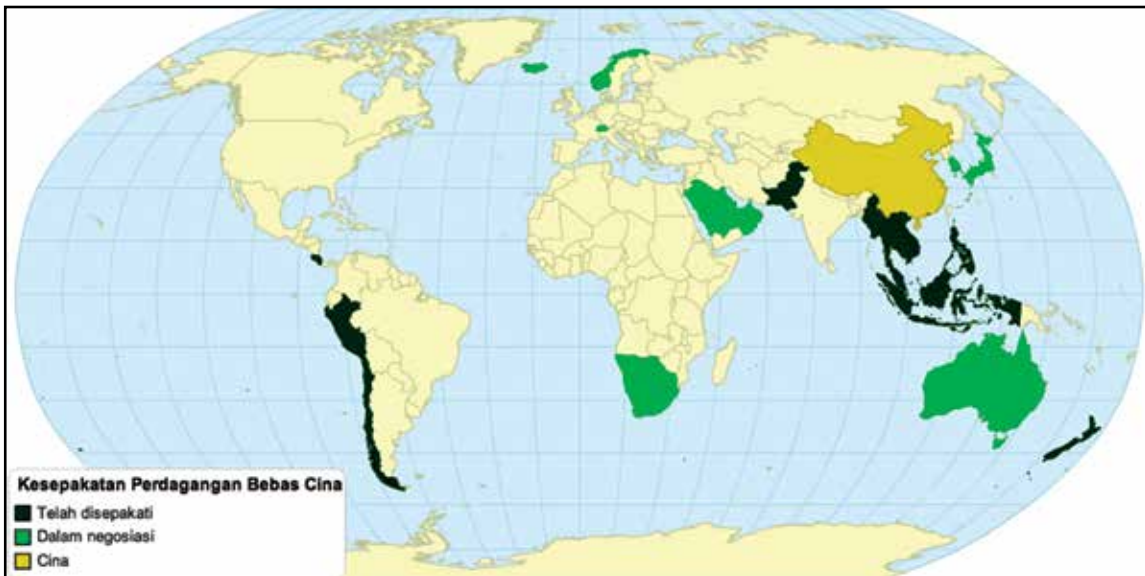
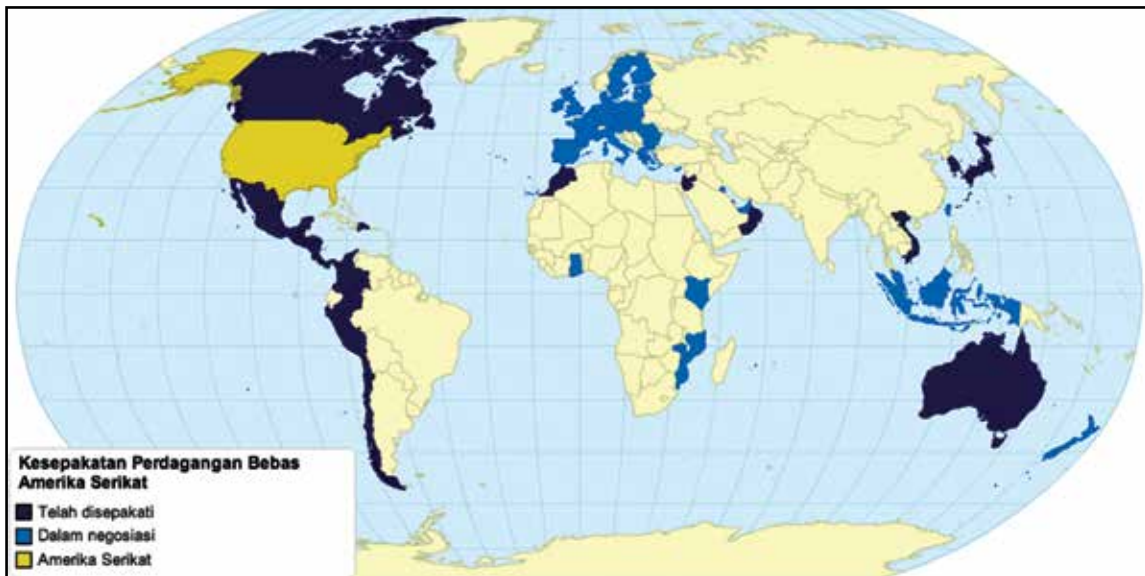
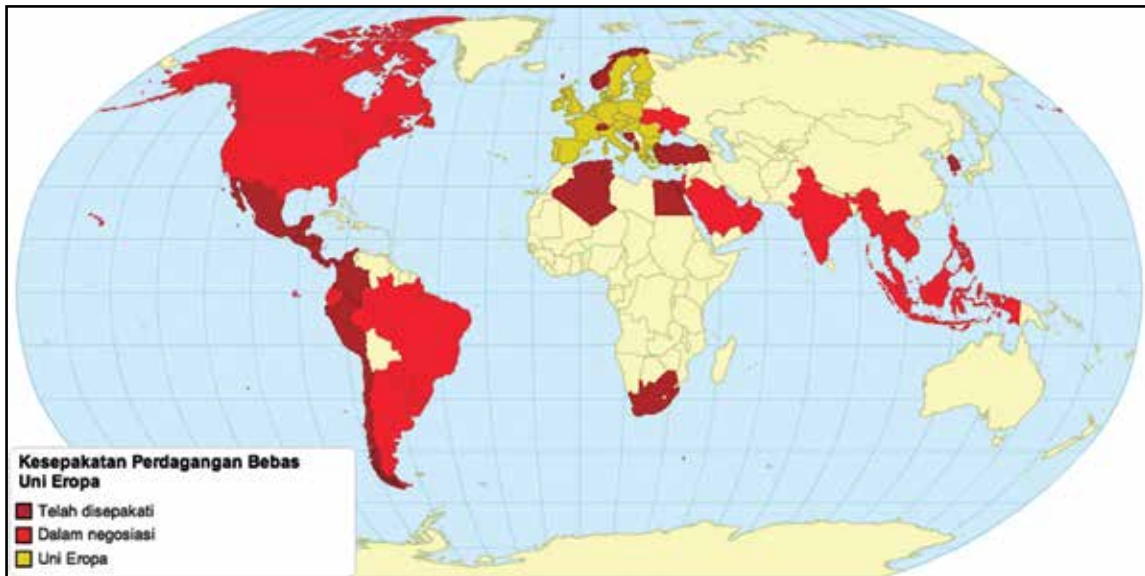
Dalam penyatuannya, terdapat sebuah lingkungan baru yang dapat memimpin terbukanya kebuntuan WTO. Jika hal ini terjadi, hal paling berbahaya yang akan ada adalah apa yang akan timbul setelah *Bali Package*. "Empat negara lama" mempunyai strategi penyerangan yang kuat yang muncul dari pengajuan sisa isu Singaur (investasi, usaha perolehan pemerintah, dan persaingan), termasuk isu baru seperti jasa lingkungan, hingga tingkat multilateral dari sebagian besar keuntungan mereka di perundingan FTA. Negara-negara BRICS memiliki strategi pertahanan lebih dengan satu isu penyerangan dalam kaitannya dengan subsidi pertanian negara-negara maju, akan tetapi pada tahapan krisis ekonomi negara maju yang mereka lihat, bahwasanya bukanlah sesuatu yang mungkin untuk memperbaiki.

Bahkan tidak ada satupun yang belum disampaikan mengenai negosiasi WTO. Terdapat sebuah ketidaksepakatan dalam konteks fleksibilitas terhadap negara maju dalam Fasilitas Perdagangan; lamanya ketentuan perdamaian bagi "ketahanan pangan" saat ini dalam perdebatan dan tak ada kejelasan jika dikaitkan dengan hari setelah *Bali Package*.

Walaupun WTO bergerak sangat lambat, namun WTO terlibat dalam sebagian besar perluasan liberalisasi di seluruh aspek kemanusiaan dan sumber daya alam seluruh dunia.

Derailers' Guide

to the WTO and Free Trade Regime 2.0



Barisan Kedua: Dorongan Agresif untuk Generasi Baru Kesepakatan Perdagangan Bebas

Sebuah generasi baru Kesepakatan Perdagangan Bebas dan Penanaman Modal (Free Trade and Investment Agreement/FTA), luas, komprehensif, dan sangat ambisius menyebar keseluruh dunia dan mengancam untuk mendominasi kebijakan perdagangan global.

Standar Amerika Serikat

Kesepakatan Kemitraan Trans-pasifik (TPPA) adalah perjanjian perdagangan bebas yang sedang dinegosiasikan oleh sembilan negara di Wilayah Asia Pasifik: Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia, dan Vietnam dari ASEAN; Australia dan Selandia Baru dari wilayah Pasifik; Chile dan Peru dari Amerika Latin; dan Amerika Serikat dari Amerika Utara.

Dianggap sebagai inisiatif yang dipimpin oleh Amerika Serikat, agenda dari perundingan TPP ini berkisar pada 5 segi tetap yang menurut Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat akan membuat TPP sebuah "landmark, Kesepakatan Perdagangan Abad ke-21".¹ Kunci elemen-elemennya adalah: Akses Pasar Komprehensif; Kesepakatan Regional sepenuhnya untuk memfasilitasikan pengembangan produksi dan rantai persediaan; isu-isu lintas sektor tentang Peraturan Perhubungan, Daya Saing dan Fasilitasi Bisnis, Prusahaan kecil dan menengah, dan Pengembangan, dan tantangan perdagangan yang baru yang berhubungan dengan ekonomi digital dan teknologi hijau (teknologi ramah lingkungan).

Kelima fitur tetap TPP dan salah satu yang sudah muncul sebagai inovasi dalam

perundingan perdagangan adalah ide kesepakatan hidup, yang akan memungkinkan untuk memperbaharui Kesepakatan untuk membahas isu-isu dimasa depan serta memperluas keanggotaan untuk mengakomodasi pendatang baru.

Pembahasan TPP mencakup keseluruhan set isu-isu dari isu akses pasar yang lebih tradisional dalam barang dan jasa, aturan asal dan beban teknis untuk berdagang, dan untuk yang disebut isu Fasilitasi Perdagangan Singapura, aturan persaingan, penanaman modal dan pengadaan oleh pemerintah. Prinsip utama yang memandu negosiasi ini adalah ketaatan kepada "standar tinggi" di semua bidang.

Ronde ke-16 negosiasi terkini yang ditutup di Singapura dimana telah dilaporkan bahwa "kemajuan solid di sejumlah bidang utama seperti Peraturan Perhubungan, Adat Istiadat, dan Pembangunan."² Namun poin yang lekat tetap berada di bidang yang lebih berselisih yaitu Kekayaan Intelektual, Lingkungan, Persaingan, dan Peraturan Keburuhan³. Pengembangan besar lainnya seputar pembahasan TPP adalah niat Jepang yang akhir-akhir ini diumumkan untuk bergabung dalam pembahasan, sebuah gerakan yang memicu oposisi dari dalam maupun luar Jepang, termasuk dari politisi Amerika Serikat

yang sangat kritis terhadap pembatasan perdagangan Jepang pada ekspor mobil dari Amerika.⁴

FTA didorong-daya saing Uni Eropa

Tak ketinggalan, Uni Eropa juga telah mengikuti jejak perdagangan bebas bilateral secara agresif selama lima tahun belakangan dengan merek sendiri yang disebut FTA didorong-daya saing. Pada tahun 2007 diluncurkan Perundingan FTA secara serentak di Asia dengan Korea, India dan blok wilayah ASEAN. Kesepakatan dengan Korea mulai berlaku pada tahun 2011, mewakili generasi pertama FTA Uni Eropa di FTA Asia. Perundingan dengan India berlanjut dan penilaian optimistik menunjukkan kontur yang bermunculan.⁵

Perundingan dengan ASEAN bergeser pada tahun 2010 ketika Uni Eropa mengambil pendekatan bilateral yang lebih agresif, menyampingkan untuk sementara waktu mendekati wilayah ke wilayah untuk pembahasan tersebut. Di bawah pendekatan bilateral, sebuah kesepakatan telah ditempa di Singapura di akhir tahun 2012; perundingan berlanjut secara pesat dengan Malaysia, dan pembahasan baru telah diluncurkan dengan Vietnam (2012), dan yang paling terkini adalah dengan Thailand (2013). Perundingan juga diharapkan untuk diluncurkan tahun ini dengan Filipina dan Indonesia.

Kemitraan Trans-Atlantik

Dipuji sebagai “pengubah permainan” yang besar pada perdagangan global, Kemitraan Perdagangan dan Penanaman Modal Trans-Atlantik (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership / TTIP) adalah “Kesepakatan penanaman modal yang ambisius,

komprehensif, dan berstandar tinggi”⁶ sedang dirundingkan oleh dua adidaya perdagangan yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jika atau saat Kesepakatan diputuskan, TTIP yang diluncurkan pada Februari 2013 dapat menjadi Kesepakatan Perdagangan Terbesar dalam sejarah. Potensi Kesepakatan diharapkan untuk menaikkan dua negara sarat krisis ekonomi untuk mengiringi 90 miliar euro untuk Amerika Serikat, 120 miliar euro untuk Uni Eropa, dan sekitar 100 miliar euro untuk seluruh dunia.⁷

Sasaran utama dalam kesepakatan tersebut adalah untuk mengalamatkan isu tentang beban peraturan ke penanaman modal dan perdagangan. Sasaran ini akan diraih melalui harmonisasi peraturan dan standar, dan aturan pembangunan, menyangkut prinsip-prinsip dan kerjasama mode baru dalam isu-isu global seperti Hak Kekayaan Intelektual.⁸

RCEP dan Konsolidasi Asia

Negara-negara Asia di sisi lain mengembangkan platform sendiri bahkan ketika mereka mengadakan perundingan baik dengan kedua Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di bawah bendera Persatuan Ekonomi Asia Timur, ASEAN telah dipelopori bersama dengan enam bangsa lainnya yang telah memiliki persetujuan komprehensif FTA—Cina, India, Korea, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. ASEAN juga mengejar konsolidasi dari Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership / RCEP), yang telah dideskripsikan sebagai “Blok Perdagangan Bebas Terbesar di Dunia”.⁹ Sementara RCEP membidik untuk penghapusan progresif dari beban tarif dan non-tarif, prinsip dasar persetujuan lebih untuk mengharmoniskan FTA yang ada dan untuk membuat mereka konsisten dengan aturan-aturan WTO. Dibandingkan dengan TPP, RCEP membuat tuntutan lebih sedikit kepada perubahan ekonomi.¹⁰

Pengembangan lainnya di Asia telah diluncurkan pada akhir tahun 2012 tentang pembahasan trilateral antara Cina, Jepang, dan Korea, tiga ekonomi terbesar di wilayah tersebut. Pertemuan tugas tingkat pertama menuntaskan kesepakatan yang diharapkan untuk dimulai pada akhir Maret di Seoul.¹¹

Gerakan untuk mengkonsolidasi sebuah "Kemitraan Ekonomi Regional Sepenuhnya" melalui RCEP dan perundingan untuk FTA Cina-Korea-Jepang adalah respon Asia terhadap dinamika perdagangan global yang berubah.

Pengenaan Standar

Berlawanan pada perkiraan bahwa krisis ekonomi akan bagaimanapun memperlambat aktifitas FTA sebagai penolak tuntutan, kontrak perdagangan, dan negara-negara mengambil kebijakan ekonomi dengan lebih hati-hati dan melihat kedalam, yang telah kita lihat sebaliknya telah ada dorongan yang lebih agresif untuk meluncurkan dan mengakhiri FTA sejak krisis ekonomi. Tujuan pemain utama untuk bertahan sebagian besar sama, tetapi telah menjadi lebih terdepan dan politis. Kesepakatan dimaksudkan untuk melindungi daya saing mereka, pekerjaan aman di rumah, keamanan lebih membutuhkan bahan mentah untuk menjalankan industri milik mereka, untuk mendorong akses pasar yang lebih besar untuk barang dan jasa, penanaman modal terbuka, dan melindungi kepentingan perusahaan. Namun Kesepakatan ini sama-sama tentang reformasi kebijakan negara untuk menyesuaikan standar baru yang dilihat oleh beberapa analis sebagai cara melampaui parameter Kesepakatan perdagangan. Sebuah laporan di koran Guardian di UK merujuk kepada TPP untuk contoh sebagai "sebuah upaya untuk menggunakan sudi grahil perdagangan bebas untuk memaksakan kondisi dan menimpa hukum dalam negeri"¹²

Setidaknya dua bidang utama- penggalan- penggalan pada penanaman modal dan hak kekayaan intelektual- tingkat ambisius sedang didorong di bawah tuntutan FDA generasi baru dari komitmen negara berkembang melampaui kewajibannya di bawah WTO (WTO plus) dan akan berarti sebuah erosi besar dalam ruang kebijakan dalam negeri.

Standar pada penanaman modal sedang didorong di bawah kedua Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memimpin perundingan menyediakan perlindungan investor ke tingkat yang lebih tinggi termasuk dalam bentuk investor kontroversial untuk mekanisme penyelesaian sengketa negara (ISDS).

Penggalan pada hak kekayaan intelektual adalah bidang yang berselisih lainnya dimana ambisi tingkat tinggi sedang didorong melalui pembahasan FTA. Konsisten dengan posisi yang lama dipegang dalam perlindungan kekayaan intelektual, FTA Amerika Serikat dan Uni Eropa- mengajukan tuntutan komitmen yang melampaui komitmen di bawah kesepakatan WTO dalam kekayaan intelektual (WTO-TRIPS). Jika sepakat di bawah FTA, penggalan IPR dengan ketentuan TRIP-plus akan efektif menunda produksi obat generik yang penting untuk banyak pasien di seluruh negara berkembang yang sedang mencari obat yang lebih terjangkau untuk pengobatan penyakit yang mengancam hidup mereka.

Pendekatan "sepaham"

FTA generasi baru juga mengubah proses dan mendekat ke perundingan penanaman modal dan dagang. Pembahasan TPP yang dipimpin Amerika Serikat telah melerakkan pada tempat pendekatan "sepaham" untuk menegosiasi FTA. Pendekatan ini mengambil persetujuan dalam liberalisasi tingkat tinggi sebagai titik awal pembahasan. Sembilan

negara yang memprakarsai pembahasan kurang lebih berada pada pijakan yang sama dengan menganggap sejumlah prinsip-prinsip penting dan isu-isu konkret. Mengambil prinsip “kesepakatan hidup”, negara-negara tersebut seiring jalan dapat memilih untuk bergabung dalam pembahasan di bawah satu set pra-kondisi terutama untuk membuktikan kepatuhan terhadap standar liberalisasi tinggi.

Pendekatan “bandwagon (kebersamaan)” klasik ini terlihat bekerja karena semakin banyak negara menyatakan minat untuk bergabung menjadi bagian pembahasan TPP karena rasa takut akan tertinggal atau ditinggalkan. Di Asia Tenggara, dua negara lagi, Filipina dan Thailand telah menyatakan niat serius untuk mengikuti TPP. Filipina contohnya akhir-akhir ini mengumumkan sebuah “road map (peta jalan)” untuk mengikuti pembahasan tersebut.¹³

Sebuah pendekatan serupa telah diambil di bawah RCEP dengan skema pencapaian terbuka yang akan memperkenankan anggota lain untuk bergabung selama mereka setuju untuk memenuhi aturan dan pedoman pengelompokan.

- 1 Outlines of the transpacific partnership agreement. (Ringkasan Kesepakatan Kemitraan Transpasifik) USTR website. Terakhir dibuka 18 Maret 2013. <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partnership-agreement>
- 2 16th Round of TPP talks end with solid progress (Ronde Pembahasan TPP berakhir dengan kemajuan solid). MY Sinchew.com. terakhir dibuka 18 Maret 2013 2013. <http://www.mysinchew.com/node/84037?tid=37>
- 3 TPP members finish 16th round of negotiations report by M. Singh of Business Times Singapore (Anggota-anggota TPP menyelesaikan 16 ronde negosiasi. dilaporkan oleh Singh dari Business Times Singapore). terakhir dibuka 18 Maret 2013. <http://www.businesstimes.com.sg/premium/singapore/tpp-members-finish-16th-round-negotiations-20130314>
- 4 Various Congressional Democrats Oppose Japan's TPP bid. Report by z. Keck for The Diplomat (Beragam Demokrat Kongresional Mengoposisi Tawaran TPP Jepang. Dilaporkan oleh Z. Keck untuk The Diplomat). Terakhir dibuka 18 Maret 2013. <http://thediplomat.com/pacific-money/2013/03/18/various-congressional-democrats-oppose-japans-tpp-bid/>
- 5 The EU's Free Trade Agreements-Where are We? European Commission Memo (Kesepakatan Perdagangan Bebas Uni Eropa – Dimana Kita? Memorandum Komisi Eropa). 18 Februari 2013. Terakhir dibuka 18 Maret 2013. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-113_en.htm
- 6 White House Fact Sheet on TTIP (Lembaran Fakta Rumah Putih terhadap TTIP). <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2013/june/wh-ttip>
- 7 Speech by Commissioner De Gucht on TTIP at the annual Aspen Institute Conference in Prague (Pidato oleh Komisioner De Gucht pada TTIP di Konferensi Tahunan Institut Aspen di Prague), 10 Oktober 2013. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151822.pdf
- 8 White House Fact Sheet on TTIP (Lembaran Fakta Rumah Putih terhadap TTIP). <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2013/june/wh-ttip>
- 9 Asean and Partners Launch Regional Comprehensive Partnership. Report by M. Hiebert and L. Hanlon. Center for Strategic and International Studies website. (Asean dan sekutu meluncurkan Kemitraan Komprehensif Regional. Dilaporkan oleh M. Hiebert dan L.Hanlon. website Pusat Strategi dan Studi Internasional) Terakhir dibuka 18 Maret 2013. <http://csis.org/publication/asean-and-partners-launch-regional-comprehensive-economic-partnership>
- 10 Asean and Partners Launch Regional Comprehensive Partnership. Report by M. Hiebert and L. Hanlon. Center for Strategic and International Studies website. (Asean dan sekutu meluncurkan Kemitraan Komprehensif Regional. Dilaporkan oleh M. Hiebert dan L.Hanlon. website Pusat Strategi dan Studi Internasional). Terakhir dibuka 18 Maret 2013. <http://csis.org/publication/asean-and-partners-launch-regional-comprehensive-economic-partnership>
- 11 Insight: Hopeful China wants Japan, S. Korea in own trade pact. Report from Asahi Shimbun (Wawasan: Cina penuh harapan ingin Jepang, Korea Selatan dalam pakta perdagangan sendiri dilaporkan oleh Asahi Shimbun). 18 Maret 2013. Terakhir dibuka 18 Maret 2013. http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201303180007
- 12 The Pacific free trade deal that's anything but free by Dean Baker of the Guardian (Kesepakatan Perdagangan Bebas Pasifik, isu segalanya selain bebas oleh Dean Baker dari the Guardian). <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/27/pacific-free-trade-deal>
- 13 PH eager to join transpacific pact. Report by Rappler (PH berhasrat untuk mengikuti pakta Transpasifik). 18 Maret 2013. terakhir dibuka 18 Maret 2013. <http://www.rappler.com/business/economy-watch/24088-ph-transpacific-trade-pact>

Gerakan-Gerakan Kunci dalam Perlawanan Dunia Terhadap Agenda Pasar Bebas

Gerakan-gerakan perlawanan menentang kesepakatan pasar bebas memainkan peran yang signifikan dalam menggelincirkan WTO, dan telah berhasil menunjukkan kekuatan protes dari orang-orang melalui aliansi dan jaringan. Kesepakatan pasar bebas (FTA) memusatkan kekuasaan ekonomi dan sumber daya alam dalam tangan beberapa orang saja, mengambil alih keberdayaan komunitas, menghancurkan keberagaman alam serta merendahkan kedaulatan pangan; karena itulah ia telah memunculkan penolakan dari berbagai pihak yang dirugikan oleh agenda pasar bebas.

Beberapa perjuangan penting dalam kampanye melawan WTO telah diusung secara global semenjak kemunculannya, menjadi pengingat bagaimana institusi tersebut telah menyebarkan dan mempromosikan sebuah sistem yang tidak adil dan seimbang. Pada beberapa tahun belakangan, perjuangan akar rumput melawan WTO dan pasar bebas semakin menguat pada area Global South.

Inilah beberapa gerakan penting dari seluruh dunia untuk melawan agenda pasar bebas selama beberapa tahun:

Chiapas, Mexico (1994):

Pada 1 Januari 1994, hari dimana Kesepakatan Pasar Bebas Amerika Utara (NAFTA) mulai dilakukan, Pasukan Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) meluncurkan kampanye bentrok senjata selama dua minggu bersama

pasukan militer Meksiko. Perjuangan mereka membuka jalan bagi gerakan tanpa kekerasan yang menuntut reformasi lahan dan hak asasi pribumi. EZLN menggunakan internet untuk menyebarkan kritik-kritik kreatif/artistik terhadap ketidak-adilan kapitalis melalui jaringan pendukung internasional. EZLN tidak berusaha untuk mengambil alih kekuasaan negara, namun berusaha untuk menciptakan ruang bagi demokrasi langsung yang otonom. Mereka adalah salah satu dari para pionir gerakan anti-globalisasi.¹

Pertarungan di Seattle, Washington (1999):

Pada 30 November 1999, mobilisasi yang dikenal sebagai N30 mengambil tempat di Seattle, Washington. Pada acara tersebut, para protestan memblokir jalan masuk para delegasi menuju pertemuan WTO. Pelajar, petani kecil, pengusaha kecil, kelompok gereja dan komunitas pribumi menemukan tujuan bersama untuk menentang neo-liberalisme. Ratusan kelompok non-pemerintah melakukan protes melawan WTO, dan mengakibatkan pelemahan fatal kepada persepsi global terhadap WTO. Seattle adalah bukti bahwa terdapat penentangan keras terhadap neo-liberalisme.²

Pertarungan di Praha, Republik Ceko (2000): Pada September tahun 2000, arena perang untuk protes tersebut bergeser ke Eropa, dimana 10.000 orang berdatangan dari seluruh dunia—siap untuk melakukan aksi

menentang IMF dan Bank Dunia selama waktu pertemuan tahunan mereka. Para protestan anti-globalisasi tersebut melakukan demonstrasi dan terlibat dalam pertarungan jalan pada daerah dimana pertemuan tersebut dilaksanakan, dan seperti yang dikatakan oleh seperti kata seorang petugas Bank Dunia, inisiatif tersebut "secara efektif dihentikan". Konvensi tersebut pada akhirnya diakhiri sehari sebelum jadwal sebenarnya.³

Protes Pertemuan Delapan dari Kelompok Genova, Italia (2001):

Dari tanggal 18 hingga 22 Juli 2001, protes di Genova dihadiri kurang lebih 200.000 demonstran yang terlibat bentrok bersama polisi, yang diakhiri dengan dikirimkannya para protestan tersebut ke rumah sakit dalam jumlah besar; para petugas keamanan bahkan juga melakukan razia di malam hari. Orang-orang yang ditahan pasca aksi tersebut menyatakan bahwa mereka diperlakukan secara tidak layak oleh para polisi.⁴

Protes ini juga ditandai oleh kematian Carlo Guigliani, seorang protestan anti-globalisasi yang ditembak oleh seorang polisi, yang mengklaim melakukan penembakan tersebut untuk mempertahankan dirinya pada saat demonstrasi terjadi.

Chiang Mai, Thailand (2001 & 2006):

Pada bulan Maret 2001, ratusan petani dan pelajar melakukan protes diluar gedung pertemuan WTO di Chiang Mai. Mereka membuang kentang, bawang putih, bawah bombay dan biji kedelai pada area lobi acara, untuk menekankan bagaimana Kesepakatan WTO mengenai Agraria telah mencelakai mereka.⁵

Sebuah koalisi pengorganisir Thailand yang merepresentasikan pasien AIDS, konsumen, petani, aktivis kesehatan, kelompok hak asasi manusia dan berbagai organisasi sipil lainnya memimpin protes di Chiang Mai tersebut.⁶



Pada Januari 2006, FTA Watch, sebuah koalisi nasional yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil yang dibentuk pada tahun 2003 untuk menentang FTA Thailand-Amerika, bergerak ke area luar dari hotel dimana perbincangan tersebut ditempatkan. Hal ini membuka jalan bagi kemunculan suara kritis yang kuat dari Thailand.⁷

Delhi, India (2001, 2008 & 2009):

Sebelum saat Ministerial Doga, Kampanye Masyarakat India Menentang WTO (IPCA WTO) pada tahun 2001 memimpin iring-iringan besar pada Purana Wila di Delhi untuk memprotes posisi pemerintah India pada negosiasi WTO. Formasi Forum India menentang WTO pada tahun 2008 semakin menguatkan pertarungan melawan FTA. Pada September 2008, beberapa perwakilan dari serikat dagang, gerakan-gerakan masyarakat dan berbagai organisasi sipil berkumpul bersama untuk mempelajari isu-isu kritis yang dilibatkan dalam pasar bebas Eropa-India, dan pada akhirnya mereka membentuk koalisi. Di bulan September 2009, konsultasi dan mobilisasi pertama untuk menentang pasar bebas diorganisir di Delhi. Koalisi tersebut bergabung dengan mobilisasi melawan Mini-ministerial WTO di Delhi, sebuah pertemuan untuk menghidupkan kembali negosiasi WTO, dimana India menjadi tuan rumahnya. Pada 3 September 2009, IPCAWTO, semua partai politik kiri, para petani kiri dan serikat dagang serta berbagai organisasi petani mandiri ikut bergabung dalam aksi tersebut. Lebih dari 51.000 petani yang berasal dari Serikat Bhartiya Kissan dan berbagai kelompok lain bergabung di depan gedung parlemen, mengambil risiko penangkapan oleh polisi. Untuk pertama kalinya, para petani India secara terbuka mengekspresikan posisi mereka sebagai oposan pasar bebas.⁸

Manila, Filipina (2003):

Di Filipina, Koalisi untuk Menghentikan Putaran Baru, sebuah jaringan dari berbagai organisasi akar rumput, gerakan sosial, individu-individu dan LSM; meluncurkan sebuah kampanye nasional, untuk mengganggu perbincangan Putaran Doha. Kampanye nasional ini adalah pemanasan untuk pertemuan Ministerial Cancun. Pada September 2003, berbagai aksi massa telah dilakukan. 'Globalisasi: Pengkhianatan Terhadap Orang-orang!', 'GATT-WTO: Wabah Terburuk!'; 'Hentikan Perbincangan Putaran Baru!' dan 'Filipina Tidak Untuk Dijual!' adalah beberapa slogan yang terdengar sepanjang waktu tersebut. Sekitar 8.000 protes melakukan iring-iringan sepanjang dua kilometer di salah satu jalanan paling sibuk di Manila.⁹

Cancun, Meksiko (2003):

"WTO Membunuh Petani!" adalah slogan yang terus berdentung di Cancun, Meksiko pada tahun 2003; dimana seorang martir bernama Lee Kyung Hae berdiri menantang Konferensi WTO ke-5 dan melakukan bunuh diri setelah meneriakkan kata-kata ini. Ministerial Cancun di tahun 2003 juga merupakan sebuah titik balik; karena berbagai aksi diantara petani, masyarakat nelayan, pekerja, kelompok-kelompok perempuan yang tersebar di seluruh Asia—terutama pada negara-negara seperti Thailand, Filipina, Indonesia, dan India bergerak bersama, yang berakhir dengan gagalnya perbincangan perdagangan Doha.

Quebec, Kanada (2003):

Pada Juli 2003, ratusan demonstran berkumpul di Montreal untuk menentang sebuah pertemuan WTO dimana "Agenda Pembangunan Doha" akan didiskusikan. Kesepakatan yang diambil di Doha, Qatar 2001 telah membahas segalanya dari mulai subsidi agraria hingga investasi asing.¹⁰

'Tak Seorangpun Ilegal' adalah teriakan dari berbagai kelompok anti-kemiskinan dan anti perang tersebut pada saat melakukan aksi.

Pertarungan di Hong Kong (2005):

'Hong Kong akan menjadi Stalingrad bagi WTO,' adalah salah satu slogan dari gerakan sosial Asia, Eropa dan Amerika Latin sepanjang Konferensi Ministerial ke-6 yang berlangsung di Hong Kong pada Desember 2005.¹¹

Untuk mempertahankan kemenangan pertarungan yang telah terjadi di Cancun, gerakan sosial di seluruh Asia termasuk berbagai kelompok pekerja, melakukan mobilisasi dalam jumlah besar di Hong Kong. Barisan Wanchai pada 17 Desember 2005 telah menjadi ikonik, akibat fakta bahwa ribuan polisi dalam seragam anti-kerusuhan bentrok dengan para aktivis yang dipimpin oleh para petani, nelayan dan pekerja migran dari seluruh Asia, dalam jumlah yang sama. Polisi menggunakan gas air mata dan tongkat pemukul, menangkap dan memenjarakan ratusan aktivis. Sebuah Parade Fluvial yang dipimpin oleh para nelayan Filipina dan Indonesia membawa fokus kepada marginalisasi mengerikan serta pengacuan komunitas-komunitas nelayan kecil tersebut, kepada masyarakat.¹²

Jenewa, Swis (2006):

Pada 28 Juli 2006 Pertemuan Konsel Umum WTO dilakukan di Jenewa, di tengah protes marak yang dilakukan di luar tempat acara tersebut. La Via Campesina bersama beberapa organisasi yang paralel dengan Parade Fluvial yang dilakukan oleh masyarakat nelayan, berbaris menuju area pertemuan WTO. Di bagian depan barisan, sebuah patung raksasa yang menggambarkan kepala Pascal Lamy yang terputus diangkut

oleh traktor, diikuti oleh Liga Petani Korea yang mengusung sebuah peti mati yang menyimbolkan kematian WTO. Mereka diikuti oleh delegasi La Via Campesina dalam jumlah besar yang merepresentasikan 12 negara, anggota-anggota pergerakan internasional seperti Friends of the Earth International, Our World is Not for Sale, Focus on the Global South, Koalisi Jenewa Menentang WTO, sebagaimana halnya dengan para petani dan aktivis. Slogan-slogan seperti 'Putaran Doha telah mati, panjang umur kedaulatan pangan!' serta 'WTO telah sekarat, mati kubur bajingan itu!' diserukan oleh pergerakan internasional ini dalam aksi menentang WTO.¹³

- 1 <http://www.movements.org/case-study/entry/zapatista-army-of-national-liberalization/> Terakhir dilihat 20 September 2013
- 2 <http://www.theguardian.com/world/1999/dec/05/wto-globalisation>. Terakhir dilihat 23 September 2013
- 3 <http://www.marxists.org/history/etol/newspape/isj2/2001/isj2-090/bello.htm> Terakhir dilihat 23 September 2013
- 4 <http://www.theguardian.com/world/2008/jul/17/italy.g8> Terakhir dilihat 21 September 2013
- 5 http://books.google.co.in/books?id=fs9BVn11_TcC&pg=PT218&lpg=PT218&dq=chiang+mai+protests+wto&source=bl&ots=NPVqlzt15f&sig=d4bIpmZGSUw7-KsXcYGD4z1rUbA&hl=en&sa=X&ei=ZBNEUsv2KovNrQeZ-ICQDg&ved=0CEsQ6AEwBQ#v=onepage&q=chiang%20mai%20protests%20wto&f=false Terakhir dilihat 26 September 2013
- 6 <http://www.multinationalmonitor.org/mm2006/012006/khor.html> Terakhir dilihat 26 September 2013
- 7 <http://focusweb.org/content/decade-grassroots-resistance-wto-and-free-trade> Terakhir dilihat 26 September 2013
- 8 <http://focusweb.org/content/decade-grassroots-resistance-wto-and-free-trade> Terakhir dilihat 26 September 2013
- 9 http://www.nadir.org/nadir/initiativ/aggp/free/cancun/action/asia/0914march_manila.htm Terakhir dilihat 24 September 2013
- 10 <http://www.cbc.ca/news/canada/hundreds-protest-wto-meeting-in-quebec-1.404221> Terakhir dilihat 24 September 2013
- 11 <http://www.commondreams.org/headlines05/1012-04.htm> Terakhir dilihat 25 September 2013
- 12 <http://focusweb.org/content/decade-grassroots-resistance-wto-and-free-trade> Terakhir dilihat 20 September 2013
- 13 <http://focusweb.org/content/decade-grassroots-resistance-wto-and-free-trade> Terakhir dilihat 20 September 2013

Melampaui Bali: Bahaya yang Diajukan oleh Agenda Ekonomi Paska-Bali

Dirjen WTO Roberto Azevedo memberikan pernyataan terbuka bahwa "rencana negosiasi" pada Konferensi di Bali nanti dapat diperluas melebihi Putaran Doha. Pada 7 Oktober lalu, ia mengatakan kepada para reporter di New Delhi: "Menurut pandangan saya, Bali sangat penting untuk membangun kondisi agar terus maju ke wilayah-wilayah selain yang sudah ada, itu yang ingin kami lihat di bulan Desember nanti, bukan hanya membahas rencana pembangunan Doha tetapi dalam berbagai isu lain yang berhubungan dengan perdagangan dan juga tentang kepentingan negara-negara anggota."¹

Di sisi lain, Amerika Serikat (A.S) telah memberikan isyarat akan rencana paska-Bali, yang akan mencakup peluncuran negosiasi-negosiasi baru menggunakan pendekatan baru. Dalam pidato terkininya, USTR Frontman mengatakan "Bali memiliki potensi untuk menjadi langkah vital menuju WTO menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang dapat mengarah kepada kesempatan baru lain—sebuah inovasi dalam pendekatan kita terhadap negosiasi multilateral."²

Semakin jelas, bahwa hasil yang dirumuskan di Bali akan menjadi sebuah kesepakatan yang disebut Paket Bali dan Deklarasi Bali, yang akan memetakan jalan kedepan bagi WTO dan

Apa saja elemen yang akan disinggung dalam paket paska-Bali, dan mengapa orang-orang harus waspada akan agenda yang sedang muncul ini?

Isu-isu yang baru (dan yang tak terlalu baru)

Bali dapat memperkenalkan lebih banyak isu ke dalam agenda WTO. Untuk waktu yang sangat lama, pengenalan isu-isu baru yang juga dikenal sebagai Isu Singapura (fasilitasi perdagangan, kebijakan kompetisi, investasi dan kepemilikan pemerintah) ke dalam agenda tersebut telah ditentang oleh negara-negara berkembang. Di Bali, kemungkinan kesepakatan multilateral mengenai fasilitasi perdagangan dapat memulai terbukanya jalan, tidak hanya untuk menambahkan isu-isu yang baru kedalam agenda, namun juga untuk memfasilitasi berbagai negosiasi pada isu yang lainnya seperti:

Barang dan Jasa Lingkungan (EGS) -

Agenda Doha menyediakan mandat bagi negosiasi-negosiasi mengenai perdagangan barang dan jasa lingkungan. Negosiasi mengenai EGS yang secara luas berurusan dengan pengurangan atau penghapusan batasan tarif dan non-tarif pada Barang dan Jasa Lingkungan ini mengambil dua ruang yang berbeda di badan WTO. Bagian tentang Barang Lingkungan didiskusikan pada perundingan Akses Pasar Non-Agraris (NAMA), sedangkan perbincangan mengenai pelayanan jasa ditangani Oleh Sesi Khusus Konsul Perdagangan Pelayanan (CTS-SS).

OECD mendefinisikan EGS sebagai sebuah industri "yang terdiri dari aktivitas yang memproduksi kebutuhan dan pelayanan untuk menakar, mencegah, membatasi,

meminimalisir atau memperbaiki kerusakan lingkungan terhadap air, udara dan tanah, serta permasalahan yang terkait dengan limbah, kebisingan dan ekosistem. Hal ini termasuk memproduksi produk-produk teknologi bersih, dan pelayanan yang mengurangi risiko terhadap lingkungan, meminimalisir polusi dan pemakaian sumber daya alam.”³

Agenda ini mendapatkan dorongan yang besar di tahun 2010, ketika para pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) mengeluarkan sebuah deklarasi yang berisi pernyataan mengenai Barang dan Jasa Lingkungan, berikut ini:

“Kami akan meningkatkan penyebaran dan penggunaan barang dan jasa lingkungan, mengurangi hambatan yang ada juga menahan diri agar tidak memperkenalkan hambatan-hambatan baru bagi investasi dan perdagangan barang dan jasa ini, juga meningkatkan kemampuan kami untuk mengembangkan sektor ini, dengan memprioritaskan pekerjaan yang berhubungan dengan menangani ukuran non-tarif pada teknologi, barang dan pelayanan jasa lingkungan.”⁴

Setelah itu para pemimpin APEC menegaskan komitmen mereka dan “memutuskan untuk mengurangi tingkatan tarif yang telah diterapkan sampai 5 persen atau kurang, pada akhir tahun 2015 (pada daftar barang-barang lingkungan), dengan memperhitungkan situasi ekonomi, tanpa prasangka terhadap posisi ekonomi APEC di dalam WTO. Berbagai ekonomi juga akan menghapuskan hambatan non-tarif, termasuk kebutuhan akan konten lokal yang mendistorsi perdagangan barang dan jasa lingkungan.”⁵ Daftar dari sekitar 54 barang lingkungan yang akan diliberalisasi pada tahun 2015 disebut Annex C, dari Deklarasi para pemimpin APEC 2012.⁶

Agenda liberalisasi perdagangan dan investasi pada barang dan jasa lingkungan ini terus

didorong kedalam mantel besar ekonomi hijau, mengatasnamakan tindakan terhadap perubahan iklim serta pencapaian tujuan pembangunan yang terus berkelanjutan.

Namun disinilah perangkapnya. Karena negara-negara berkembang telah meliberalisasikan pasar mereka untuk kepentingan EGS, permintaan liberalisasi yang baru saja diperbarui ini berarti menuntut negara-negara berkembang untuk melakukan komitmen yang lebih besar. Hal ini berarti tidak sekedar memotong atau bahkan menghapus tarif bagi EGS, mengikat jumlah barang dan jasa lebih banyak, menghapus hambatan non-tarif, namun juga mereformasi kebijakan peraturan mengenai pelayanan jasa yang mempromosikan kepentingan domestik dibandingkan asing, yang dianggap sebagai hambatan bagi perdagangan.

Karena itu, usulan untuk meliberalisasi EGS telah dikritisi oleh negara-negara yang baru muncul seperti Brazil dan India, sebagai usulan “akses pasar” yang ditujukan menekan produk-produk ekspor (tidak harus barang-barang yang berhubungan lingkungan ataupun iklim) kedalam pasar-pasar negara berkembang.⁷

Dorongan untuk EGS ini maju adalah indikasi dari perluasan agenda yang berjangkar kepada dorongan kompetisi, model pembangunan berorientasi ekspor yang berlindung dibalik nama “ekonomi hijau”.

Rantai Nilai Global – Jargon baru lain yang didorong di dalam agenda WTO adalah konsep mengenai rantai nilai global. Merujuk kepada laporan gabungan dari Organisasi Kerjasama Ekonomi (OECD), WTO dan UNCTAD yang baru saja keluar, “rantai nilai global telah menjadi fitur dominan dari investasi dan perdagangan dunia, menawarkan prospek pertumbuhan, pembangunan, dan pekerjaan yang baru.”⁸

Perspektif GVC menunjukkan sebuah sudut pandang baru untuk melihat globalisasi dari



Judy A. Pasimio

lensa produksi barang dan jasa global yang semakin terpecah-pecah secara geografis pada tahun-tahun belakangan ini. Menurut laporan gabungan dari WTO dan Institut Ekonomi Berkembang di Jepang (IDE-Jetro) pada GVS Asia Timur, kemunculan GVC yang disebut juga sebagai “berbagi produksi, spesialisasi vertikal, perdagangan dalam tugas-tugas, atau perdagangan rantai suplai” merepresentasikan sebuah “perubahan fundamental dalam struktur perdagangan dunia.”⁹

Penekanannya tidak hanya diletakkan pada ide bahwa produksi global sekarang tersebar melintasi berbagai negara, namun bahwa setiap negara yang berpartisipasi di dalam rantai tersebut membuat sebuah kontribusi untuk menambahkan nilai produksi; entah melalui ekspor bahan mentah mereka, perakitan, atau desain, dll. Sebagaimana dikatakan oleh laporan WTO mengenai Asia Timur belakangan ini, produk-produk sekarang lebih cenderung “dihasilkan oleh dunia” dibanding “dihasilkan oleh sebuah negara

tertentu.”¹⁰ WTO telah mempromosikan ide ini melalui inisiatif ‘Buatan Dunianya, yang dimaksudkan untuk “mendukung pertukaran proyek, pengalaman, dan pendekatan praktis dalam melaksanakan dan menganalisa perdagangan dalam pertambahan nilai.”¹¹ Inilah intinya: Negara-negara yang merupakan bagian dari rantai produksi umum harus bekerja menuju pelunakan batasan perdagangan, penjaminan investasi dalam penyebarluasan teknologi, pembangunan dan peningkatan keahlian, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memanen keuntungan dari perdagangan tersebut.

Pendekatan-pendekatan baru

Di dalam samaran “pendekatan baru dan inovatif” dalam negosiasi dan atas nama mengatasi kebuntuan dalam perbincangan Doha¹², telah ada dorongan baru bagi kesepakatan plurilateral di dalam WTO.

Semenjak tahun 2012, atas inisiatif Amerika dan Australia, perbincangan terus mengarah kepada sebuah *Kesepakatan Pelayanan dalam Perdagangan (TiSA)*, sebuah kesepakatan plurilateral satu-satunya mengenai pelayanan yang dinegosiasikan oleh sekitar 50 negara yang secara kolektif dikenal sebagai kelompok "teman dekat pelayanan jasa (RGFS)¹³" yang bertujuan untuk meliberalisasikan perdagangan dan investasi dalam bidang pelayanan jasa, serta memperluas disiplin peraturan dalam semua sektor pelayanan termasuk pelayanan publik.

Menurut Pelayanan Publik Internasional (Public Services Internationals/PSI) "disiplin, atau peraturan kebijakan, akan menyediakan akses kepada pasar domestik bagi semua penyuplai asing, dengan persyaratan yang "sama mudahnya" seperti para penyuplai domestik, serta akan membatasi kemampuan pemerintah untuk mengatur, membeli, dan menyediakan pelayanan-pelayanan. Hal ini secara esensial akan mengubah peraturan bagi banyak pelayanan publik dan swasta atau komersial, dari melayani kepentingan publik menjadi melayani kepentingan profit dari korporasi-korporasi swasta asing."¹⁴

PSI menggambarkan elemen-elemen inti dari TiSA: (1) liberalisasi dalam semua bagian dan sektor, dengan mengadopsi pendekatan daftar negatif--sebagai oposan dari pendekatan daftar positif yang berada di bawah Kesepakatan Umum dalam Perdagangan Pelayanan (GATS), dimana para anggota diberikan waktu ekstra untuk menspesifikasikan sektor mana sajakah yang akan diberikan komitmen untuk diliberalisasikan; (2) dukungan nasional bagi para penyedia pelayanan asing; (3) akan terjadi proses untuk memultilateralkan kesepakatan tersebut, dengan mengizinkan negara-negara lain untuk menandatangani kesepakatan tersebut; (4) mekanisme penyelenggaraan yang kemungkinan akan melibatkan ketentuan bagi investor untuk menyatakan mekanisme penyelesaian konflik; (5) 'klaus diam' untuk

berhadapan dengan peraturan-peraturan baru yang "membatasi" dan 'klaus ratchet' yang secara otomatis mengikat eliminasi otonomi dari tindakan pengaturan pada masa depan.

Selagi TiSA jelas-jelas merupakan sebuah kesepakatan plurilateral, terdapat pertanyaan apakah kesepakatan ini harus dibiarkan berada di luar, atau haruskah ini menjadi sebuah kesepakatan multilateral di bawah WTO dalam jangka waktu singkat. Sebuah kekhawatiran serius diantara negara-negara yang menekankan TiSA saat ini adalah ketidak-hadiran ekonomi-ekonomi yang mulai muncul seperti Brazil, Cina, India dan negara-negara ASEAN yang dibicarakan. Cina telah mengekspresikan keinginannya untuk bergabung dengan negosiasi TiSA, namun masih belum jelas apakah ia akan diterima.¹⁵ Terdapat kekhawatiran bahwa Cina akan membuat tuntutan yang dapat secara efektif menurunkan tingkatan ambisi di dalam pembicaraan tersebut, serupa dengan aksi mereka pada pembicaraan Kesepakatan Teknologi Informasi (ITA) pada awal tahun ini.¹⁶ Komisi Uni Eropa (EC) misalnya, berpikir bahwa "tidaklah diinginkan bila negara-negara (yang saat ini tidak menjadi bagian dari perbincangan TiSA) akan memanen keuntungan dari kesepakatan yang mungkin akan segera terjadi, tanpa juga harus berkontribusi dan terikat oleh aturan-aturannya." Karena itulah Komisi Uni Eropa menekankan bahwa "multilateralisasi otomatis dari kesepakatan tersebut yang berdasarkan dari prinsip MFN harus secara temporer diundurkan terlebih dahulu sepanjang tidak ada massa kritis dari anggota WTO yang bergabung di dalam kesepakatan itu."¹⁷

Standar yang Lebih Tinggi

Telah diluncurkan sebuah elemen baru di dalam negosiasi perdagangan multilateral dari generasi baru FTA (lihat *Barisan Kedua*, hal. 31), kesepakatan perdagangan dan investasi yang

sangat ambisius dan komprehensif seperti TPP, TTIP, dan EU FTA di Kanada, Korea, Singapura, misalnya. Kesepakatan-kesepakatan investasi yang ambisius ini menekan batasan komitmen bagi liberalisasi perdagangan dan investasi, melampaui yang telah disepakati di WTO atau bahkan dalam kesepakatan perdagangan yang lebih tua. Standar ekstra WTO muncul dalam bidang hak-hak properti intelektual (IPR) dan investasi yang akan mengancam kesejahteraan dan hak asasi masyarakat, serta dapat menjurus kearah erosi ruang yang serius bagi kebijakan berkarya yang akan mendukung lebih banyak lagi tujuan dan target pembangunan.

- 1 Speech delivered by Director General Roberto Azevedo before Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in New Delhi. http://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra3_e.htm. Terakhir dilihat 23 Oktober 2013.
- 2 Keynote Speech delivered by USTR Michael Froman at WTO Public Forum on Innovation and the Global Trading System held in Geneva. 1 October 2013. Terakhir dilihat 18 Oktober 2013. <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/speeches/transcripts/2013/september/froman-wto-innovation-global-trade>
- 3 Opening Markets for Environmental Goods and Services. OECD Policy Brief. Januari 2005. <http://www.oecd.org/tad/envtrade/35415839.pdf>
- 4 2010 APEC Leaders Declaration in Yokohama, Japan. 2010. http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2010/2010_aelm.aspx. Terakhir dilihat 29 Oktober 2013.
- 5 2011 APEC Leaders Declaration in Honolulu, Hawaii. http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2011/2011_aelm.aspx. Terakhir dilihat 29 Oktober 2013.
- 6 Annex C: APEC List of Environmental Goods. http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2012/2012_aelm/2012_aelm_annexC.aspx
- 7 TWN Info Service on WTO and Trade Issues (June 10/04). Third World Network. 18 Juni 2010. <http://www.twinside.org.sg/title2/wto.info/2010/twninfo100604.htm>
- 8 Implications Of Global Value Chains For Trade, Investments, Development And Jobs. OECD, WTO, UNCTAD. Agustus 2013. <http://www.oecd.org/trade/G20-Global-Value-Chains-2013.pdf>
- 9 Trade patterns and global value chains in East Asia.: From trade in goods to trade in tasks. WTO and IDE-JETRO. http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/stat_tradepat_globvalchains_e.pdf
- 10 Trade patterns and global value chains in East Asia.: From trade in goods to trade in tasks. WTO and IDE-JETRO. http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/stat_tradepat_globvalchains_e.pdf
- 11 WTO website http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm.
- 12 Briefing paper prepared by the European Commission on TiSA. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/june/tradoc_151374.pdf
- 13 RGFS termasuk Australia, Kanada, Chili, Taiwan, Kolombia, Kosta Rika, Uni Eropa (28), Hong Kong, Iceland, Israel, Jepang, Liechtenstein, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Korea Selatan, Swis, Turki, dan Amerika Serikat.
- 14 Public Services International (PSI) Briefing Paper on TiSA. Juli 2013. http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/en_psi_tisa_policy_brief_july_2013_final_web.pdf
- 15 China Asks to Join the Trade in Services Agreement by James Parker. The Diplomat. Oktober 2013. <http://thediplomat.com/pacific-money/2013/10/11/china-asks-to-join-the-trade-in-services-agreement-talks/>
- 16 China Asks to Join the Trade in Services Agreement by James Parker. The Diplomat. Oktober 2013. <http://thediplomat.com/pacific-money/2013/10/11/china-asks-to-join-the-trade-in-services-agreement-talks/>
- 17 Briefing paper prepared by European Commission on TiSA. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/june/tradoc_151374.pdf

Tolak WTO; Dan Kembali Hidup!

Ketika sebagian masyarakat dunia berjuang untuk mengatasi krisis ekonomi, pangan, dan iklim yang semakin dalam, upaya untuk menghembuskan nafas kehidupan baru dalam Putaran Perundingan Doha sudah mengarah pada jalur yang salah dan berbahaya. Sampai saat ini, WTO tetap menjadi ancaman nyata bagi kehidupan umat manusia dan juga lingkungan secara global, terutama jika pemerintah ikut membenarkan kebohongan WTO yang katanya mereka akan memberikan jalan keluar dari krisis saat ini dan terus meningkatkan pembangunan.

Berdirinya WTO di tahun 1995 didukung oleh elit-elit ekonomi dunia sebagai salah satu bentuk kemenangan kapitalisme pada era pasca Perang Dingin yang memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk terus bergerak di seluruh penjuru dunia tanpa hambatan karena tidak ada yang dapat menghentikan pergerakan modal. Namun, "kesuksesan" WTO telah menciptakan keruntuhannya sendiri. Model pembangunan yang menjadi unggulan WTO - pertumbuhan ekonomi bebas dan cepat melalui liberalisasi investasi dan perdagangan- yang diakui oleh banyak pihak sebagai penyebab utama kelaparan, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim antropomorfis yang kronis. Beberapa dekade ini, pada saat perdagangan global meluas, dan begitu juga dengan kelaparan, pengangguran, ketidaktahanan pangan, kerusakan lingkungan, hutang, pemiskinan, dan dislokasi sosial, terutama di negara berkembang. Karena globalisasi ekonomi dan finansial, kemakmuran komunitas dan umat manusia di dunia, telah masuk dalam sebuah kondisi yang buruk dan masa depan yang suram.

Meskipun Negara-negara berkembang dan terhitung setidaknya 80 persen dari populasi dunia juga mengambil bagian dalam pembentukan WTO lembaga ini telah berulang kali memperlihatkan bahwa dirinya tidak mampu menanggapi keberagaman kondisi dan menentukan prioritasnya. Dibentuk dalam ketidakseimbangan kekuatan di antara banyak negara dan dalam tindakannya didominasi oleh kepentingan segelintir penguasa ekonomi di dunia, WTO tidak menawarkan sebuah system perdagangan multilateral yang adil dan berdasarkan aturan. Mekanisme penyelesaian persengketaan WTO menunjukkan tindakan hukum yang tidak adil dengan cara menentang pemerintah yang memprioritaskan kebutuhan dan kehidupan umat manusia di atas korporasi. Proses pengambilan keputusan dalam WTO didasarkan atas sebuah system yang suram, tidak transparan sebuah keputusan yang secara sistematis dimanipulasi oleh anggota-anggota WTO yang makmur untuk mengubah bentuk kekerasannya.

Yang mengejutkan adalah, tidak ada pemerintah dari Negara-negara berkembang yang berniat untuk memperlihatkan kepada rakyatnya bahwa tidak ada perkembangan jelas dari Putaran Perundingan Pembangunan Doha (DDR) dan menunjukan bahwa WTO bukan sebuah lembaga yang pro pembangunan.

Pembangunan membutuhkan kerjasama dan pondasi rezim WTO adalah kompetisi, yang mana, ekonomi, ilmu pengetahuan, masyarakat dan segala aspek kehidupan dilihat sebagai sumber komoditas yang dapat diperdagangkan. Ketahanan pangan, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan

yang baik, perlindungan terhadap lingkungan, dan layanan mendasar lain dimaknai sebagai penyimpangan terhadap ketentuan yang telah ada dalam kesepakatan perundingan WTO. Tetapi, ketika banyak pihak mulai menentang aturan “biasa” WTO bertambah banyak, ketentuan tersebut terbukti bersifat terbatas, tidak cukup dan tidak efektif.

Rebut Kembali Demokrasi dan Otonomi

Rezim WTO telah memperluas peraturan perdagangan global antara Negara dengan para pejabat yang terlibat dalam pembuatan keputusan di setiap aspek penting dalam kehidupan kita. Perjanjian WTO menentukan bagaimana pangan, industri barang, ilmu pengetahuan dan teknologi itu diproduksi, didistribusikan, dan ditetapkan harganya; serta siapa yang akan memproduksinya, di bawah syarat-syarat dan dukungan seperti apa; siapa yang memiliki potensi untuk penyimpanan biji kehidupan ini, dan harga yang kita bayar untuk obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa dan pelayanan kesehatan; layanan jasa apa yang bisa diakses masyarakat kita dalam kondisi apa dan berapa harga yang harus dibayar; apa-apa saja hal yang bisa diatur pemerintah, dan bagaimana pemerintah mengatur semua itu, dan seterusnya. Selain kehilangan besar akan kedaulatan bangsa yaitu rakyat kehilangan kontrol demokratik dan kelalaian transaksi ekonomi, masyarakat dan kehidupan. Tetapi, sebagian besar terlihat cenderung lebih memanfaatkan kekuasaan kedaulatan mereka untuk membenarkan kepentingan korporasi dan atau elit-elit ekonomi mereka, daripada mempertahankan kepentingan sebagian besar rakyatnya.

Apa yang belum dikerjakan oleh pemerintah dalam WTO, sedang kerjakan oleh orang-orang di belahan dunia lain. Penyelewengan fungsi serta bahaya dari kapitalisme global

dan WTO, menjadi bukti bagi petani kecil, pekerja, organisasi masyarakat, akademisi, pejabat yang terpilih, dan wirausaha lokal yang sejak lama bergabung membentuk kelompok gerakan untuk melindungi sistem pangan, pekerjaan, lingkungan, komunitas, dan proses politik mereka. Mendidik diri mereka sendiri dan masyarakat lainnya untuk membangun perlawanan rakyat terhadap WTO, kapitalisme global, neoliberalisme serta hegemoni korporasi, perlawanan ini menyatukan kelompok berbagai tingkatan, lintas sektor, lintas generasi, berpengetahuan dan strategis.



Derailers' Guide to the WTO and Free Trade Regime **2.0**

Memelihara dan terus membangun sistem ekonomi dan financial alternative terhadap sistem dominant ini menjadi unsur yang krusial dalam pembangunan perlawanan rakyat. Organisasi petani dan pekerja, serta siswa, pemuda, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok organisasi lainnya telah menyadari bahwa mereka tidak bisa mempercayai pemerintahan mereka untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi dunia, dan juga mereka tidak dapat mengandalkan institusi global untuk melakukan perubahan. Mereka harus secara langsung terlibat dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi, dalam hal politik untuk memastikan bahwa solusi-solusi tersebut sistematis, multi-level, demokratis, berkelanjutan, dan adil, sebagaimana disampaikan oleh Jayati Ghosh (2009):

"Perubahan yang komprehensif harus berdasarkan pada sudut pandangan yang lebih luas melebihi apa yang terlihat sejauh

ini kita lihat, khususnya bagi pembuat kebijakan di belahan dunia dunia ini. Dan, untuk menunjukkan pandangan tersebut pengambil kebijakan perlu dorongan dari masyarakat sehingga semua kita harus sadar akan keberadaan sistem alternatif yang ada dan kemungkinan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, dan menyediakan akses yang lebih luas yang sepenuhnya tidak mengikat kapasitas kreatif setiap orang dalam masyarakat ini, tidak hanya pemilihan sebagian kecil, dan yang benar-benar beroperasi dalam sebuah cara yang secara mendasar lebih demokratis baik secara domestic maupun internasional."

Merebut kembali hak-hak dan ruang kapasitas serta kembali pada sistem demokrasi dari kelompok elit kepada rakyat dan bergerak pada proses pemilihan yang ditawarkan, sudah menjadi pusat pergerakan demi perubahan. Kesepakatan-kesepakatan yang



dibentuk secara rahasia antar pemerintah dan korporasi, masyarakat telah meminta - dan kemenangan sudah tercapai di banyak tempat - hak untuk informasi dan partisipasi publik dalam proses hukum dan pembuatan kebijakan. Dua cerita dari perubahan yang komprehensif menunjukkan berbagai usaha dari banyak pihak untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang adil dan demokratis, dan tantangan dari korporat yang muncul akibat globalisasi, neoliberalisme, dan global kapitalisme, adalah kedaulatan pangan dan deglobalisasi.

Merebut Kembali Hak terhadap Pangan

Kedaulatan pangan telah dikeluarkan oleh La Via Campesina di konferensi Pangan Dunia di tahun 1996. Kedaulatan pangan menuntut hak bagi setiap orang, untuk mendapatkan hak untuk sehat, kehidupan layak, dan persediaan pangan yang cocok secara budaya, dan hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri. Kedaulatan pangan meningkatkan kecukupan persediaan pangan dimana kebutuhan pangan dalam negeri harus dipenuhi melalui produksi di tingkat dalam negeri (domestik) oleh produsen pangan skala kecil di daerah pedesaan dan kota. Hal ini akan memberdayakan petani dan keluarga tani yang bekerja di pertanian, nelayan, penggembala, dan pekerja kolektif. Kedaulatan pangan juga secara menekankan penggunaan lingkungan sesuai dengan produksi, distribusi dan konsumsi, keadilan ekonomi sosial, dan sistem pangan lokal sebagai cara untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan, dan untuk memastikan ketahanan pangan bagi semua orang. Hal ini juga akan mendorong perdagangan dan investasi yang memunculkan aspirasi kolektif masyarakat dan prioritas lokal, serta pasar dan ekonomi nasional. Kedaulatan pangan juga memajukan kontrol komunitas terhadap sumber daya produktif; reformasi

agraria dan keamanan tetap bagi produsen berskala kecil; agro-ekologi; keanekaragaman hayati; pengetahuan lokal; hak-hak petani, perempuan, masyarakat lokal dan pekerja; perlindungan social dan keadilan iklim.

Mengambil kembali hak atas pangan

Kedaulatan pangan telah menjadi jembatan bagi komunitas masyarakat desa dan kota dan melintasi berbagai *konstituen*. Di Brazil, pergerakan pekerja yang tidak memiliki lahan, *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) menyediakan lahan produksi pangan yang sehat di wilayah perkampungan MST bagi masyarakat miskin di sebagian besar daerah perkotaan. Program Pertanian Komunitas (*Community supported agriculture - CSA*) di Eropa dan Amerika Utara menghubungkan produsen pangan dan konsumen melalui produser yang menjamin harga pasar yang adil, dan pendapatan regular sementara konsumen dijamin dengan makanan yang sehat dan segar tumbuh dalam kondisi yang berkelanjutan secara ekologi. Di berbagai kota di Asia, keluarga miskin dialihkan ke pertanian kota untuk memastikan kecukupan pangan dan akses terhadap makanan sehat dan segar. Dalam melaksanakan hal tersebut, mereka mendukung proses "*re-peasantization*" tanpa melibatkan pasar pangan yang disfungsi.

Di ibukota Kolombia-Bogota, organisasi petani sudah beraliansi dengan susteran dan peneliti untuk mempromosikan pertanian agro-ekologi untuk memenangkan kebijakan public yang baik demi memajukan pasar petani kecil. Pada pertengahan tahun 2000, koalisi di kota dan desa menekan pemerintah kota Bogota untuk membuka dan mendukung 10 pasar petani kecil dimana petani dapat menjual produknya secara langsung kepada masyarakat kota. Pasar tersebut sangat sukses dan hingga tahun 2010, sekitar 2500

keluarga petani yang melaksanakan usaha tersebut mendapatkan keuntungan lebih 2 juta dolar pertahun. Bahkan pasar-pasar ini telah melayani banyak permintaan.

Pertama, pasar ini adalah pasar dari kelas-kelas sosial masyarakat berbeda yang sepakat untuk memberikan harga yang lebih rendah dari harga supermarket. Metode ini akan menguntungkan petani karena mengurangi pihak pedagang yang menjadi distributor. Rakyat miskin mampu membayar makanan yang berkualitas, menantang mitos bahwa 'makanan murah' yang diproduksi secara industri itulah yang bisa diakses oleh orang miskin. Kedua, penduduk perkotaan saat ini memandang petani sebagai penghasil produk yang berharga dan terpercaya untuk menghasilkan makanan yang sehat dan tidak lagi menganggap mereka sebagai masyarakat desa dari kalangan bawah. Ketiga, seminar mengenai kebijakan publik disusun oleh petani dari koalisi desa dan kota, yang membantu mereka dalam menuntut dan memenangkan kebijakan pendukung dalam di wilayah perkampungan dan perkotaan. Keempat, mekanisme pasar ini telah membantu untuk mempromosikan transisi dari industri pertanian menjadi pertanian ekologi. Semua petani ekologi menjual produknya di bawah tenda hijau, dengan sebuah kesepakatan bahwa harga produksi mereka tidak akan lebih tinggi dari para petani konvensional di tenda-tenda lain. Karena ketenaran produksi tenda hijau ini, petani konvensional menjadi lebih tertarik pada agro-ekologi dan mempelajarinya dari petani lain.

Pelopor **The Sister Garden Plot (SGP: Persatuan Taman Bersaudara)** di Korea Selatan mengilustrasikan dengan baik potensi kedaulatan pangan. Dimulai dari Asosiasi Petani Perempuan Korea (KWPA) dan Aliansi Nasional Perempuan Nasional Korea (KNWA) pada tahun 2008, SGP telah membentuk koperasi masyarakat di enam

provinsi dan 14 kota yang menghubungkan produsen di pedesaan dengan konsumen perkotaan. Tujuan koperasi tersebut adalah untuk menerapkan dan mendukung produksi pangan agro-ekologi dan menyediakan konsumen dengan makanan sehat yang tumbuh dari bibit asli. Pada tahun 2008, KPWA meluncurkan sebuah proyek yang disebut "Guardian of Food Sovereignty/Pelindung Kedaulatan Pangan" dengan berkolaborasi dengan KWNA, yang beranggotakan pekerja perempuan, pelajar perempuan, dan asosiasi-asosiasi masyarakat perempuan. Peserta proyek mempelajari konsep dan prinsip penguasaan pangan dengan konsumen, berpartisipasi dalam kampanye bibit asli KPWA, dan mulai menerapkan prinsip penguasaan pangan.

SGP mengurus kerja sama antara produsen pangan pedesaan dan konsumen perkotaan untuk membangun, melindungi dan memperluas sistem pangan masyarakat dan otonomi lokal dihadapkan peningkatan globalisasi korea melalui WTO dan perjanjian penanaman modal dan pasar bebas lainnya. Liberalisasi telah mengajukan kenaikan harga pasar pangan korea di pasar internasional, hal ini sangat meningkatkan kekhawatiran akan produksi pangan mayoritas, mengadu domba petani-petani korea melawan petani di negara lain dan perusahaan-perusahaan agribisnis milik amerika. Separuh dari hampir tiga juta petani di Korea adalah perempuan dan semua perempuan di Negara itu mempunyai tanggung jawab utama untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga. sejumlah perempuan yang berpartisipasi dalam SGP telah dipilih di pemerintah lokal memulai tempat yang menawarkan pendidikan gratis, dan menyebarkan kesadaran tentang pertanian yang didukung masyarakat. Untuk KWPA, SGP adalah contoh kongkrit akan pemberdayaan melalui kekuatan pangan dimana petani perempuan melindungi mata pencarian, pangan, dan kesehatan melalui koperasi yang berkelanjutan.

Meraih kembali kendali ekonomi

De-globalisasi pertama dikeluarkan secara publik pada tahun 2000 oleh Dr. Walden Bello dan Focus on the Global South, dan 2 strategi yang saling melengkapi; menantang globalisasi dan neoliberalisme yang dipaksakan oleh perusahaan: merusak sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan pemerintah yang menginginkan kapitalisme global (dekonstruksi) dan pada waktu yang bersamaan mencoba menghidupkan kembali, membangun kembali, dan membangun sistem-sistem baru berdasarkan demokrasi, keragaman alam, manusia, dan masyarakat (rekonstruksi). Deglobalisasi tidak menyerukan penghapusan pasar, perdagangan atau investasi, tetapi untuk meninjau kembali orientasi ekonomi pada berbagai tingkat sehingga perekonomian dan hubungan pasar di masyarakat kembali tertanam, dan

“hubungan sosial mencerminkan subordinasi efisiensi nilai-nilai pasar yang lebih tinggi dari masyarakat, solidaritas, dan kesetaraan.”

Perspektif deglobalisasi dapat diekspresikan melalui seperangkat prinsip-prinsip yang luas meliputi: menurunkan pertumbuhan dan menekankan kualitas hidup, pemerataan, dan lingkungan hidup; produksi ulang berorientasi untuk domestik ketimbang pasar ekspor, subsidiaritas, yakni, penempatan produksi di tingkat lokal sebagai mungkin, dengan kebijakan industri untuk merevitalisasi dan memperkuat sektor manufaktur, menggunakan kebijakan perdagangan untuk melindungi ekonomi lokal dari perusakan oleh komoditas perusahaan-subsidi, menerapkan pengukuran redistribusi lahan dan pendapatan untuk menciptakan pasar domestik yang dinamis dan untuk menghasilkan sumber daya keuangan untuk investasi, kesetaraan gender, dan demokratisasi sejati untuk kebijakan dan



pengambilan keputusan.

Artikulasi konkrit dari prinsip deglobalisasi tergantung pada konteks lokal / nasional, dan nilai-nilai dan pilihan strategis masyarakat yang berbeda. Tujuan keseluruhannya adalah untuk merekonstruksi perekonomian menjadi, moral, ekonomi politik etis dan mencapai masyarakat yang lebih besar, kesetaraan, dan keadilan. Bukti menunjukkan bahwa inisiatif lokal direncanakan dan diimplementasikan memiliki kemampuan manuver yang luar biasa dan ruang untuk kreativitas, di mana kelompok-kelompok terorganisir dapat menjamin kelangsungan hidup sehari-hari, membela, dan hak aman dan hak terhadap mereka yang mencari untuk menolak mereka, dan sistem angkat yang dapat ditingkatkan sebagai alternatif paradigma ekonomi yang dominan. Sebagai contoh, di kota Kalkuta di India, pedagang asongan yang diselenggarakan oleh The National penjaja Federasi membeli sayuran mereka, makanan, dan barang-barang lainnya langsung dari produsen skala kecil dan menjual langsung ke konsumen, banyak dari mereka adalah miskin perkotaan. Dengan demikian, mereka mendukung perekonomian masyarakat miskin lokal ` di mana produsen, distributor, dan konsumen bertanggung jawab satu sama lain. Pada tahun 2012, setelah bertahun-tahun mengorganisir, memobilisasi, dan advokasi, Federasi memenangkan bagian dari PKL (Perlindungan Mata Pencarian dan Peraturan Street Vending) Bill 2012 di Parlemen nasional. Keberhasilan upaya ini telah mengilhami gerakan lain dari orang miskin di India untuk mengatur dan menuntut perumahan, perlindungan sosial, upah yang adil, pekerjaan, perawatan kesehatan, dll.

Demikian pula, di Filipina, Alter Trade Negros, sebuah inisiatif perdagangan alternatif dan adil, mendefinisikan misinya sebagai komitmen untuk "memfasilitasi, mengembangkan, dan memperluas sistem perdagangan yang akan memberikan kontribusi untuk

meningkatkan kemandirian dan independensi produsen terorganisir terpinggirkan, dan akan menyediakan konsumen dengan produk kualitas yang kompetitif." gagasan sistem perdagangan alternatif atau perdagangan people-to-people adalah sebuah inisiatif dari Negros dan konsumen Jepang, aktivis lingkungan, dan gerakan pertanian organik yang tanggal kembali ke 1987. Komoditas pertama yang diperdagangkan oleh Alter Trade muscovado gula, yang dianggap sebagai gula orang miskin. Alter Trade mengadopsi merek "Mascabado," yang berarti gula manusia biasa kontras dengan pemilik besar dan gula perusahaan penggilingan multinasional. Lebih dari dua dekade sekarang, Alter Trade Negros terus membeli gula dari petani kecil dan penerima manfaat reformasi agraria dan praktek perdagangan people-to-people, karena menciptakan gerakan yang kuat di Filipina yang mempromosikan tidak hanya sistem perdagangan yang adil, tetapi juga membela kecil pertanian. Deglobalisasi menawarkan kerangka kerja untuk memikirkan kembali perekonomian sebagai 'commons'. J.K. Gibson Graham telah mendokumentasikan bagaimana remitansi migran dan tabungan digunakan untuk membangun usaha masyarakat di Filipina:

Tabungan Migran untuk Investasi Alternatif (MSAI) program telah disusun oleh UnladKabayan, sebuah LSM yang berbasis di Filipina yang bekerja dengan para migran, dalam kerjasama erat dengan Asian Migrant Centre berbasis di Hong Kong (AMC), sebuah LSM mitra yang, antara hal-hal lain, membantu mengorganisir para pekerja Filipina di luar negeri (OFW) untuk membentuk kelompok tabungan. UnladKabayan dan AMC memberikan pelatihan dalam manajemen bisnis dan keterampilan kewirausahaan dan di bawah pengawasan penabung migran mereka telah mampu memulai usaha dalam berbagai komunitas di Filipina. Bisnis ini meliputi pertanian organik ayam, perlengkapan pertanian dokter hewan,

penggilingan padi, produksi sabut kelapa dan pengolahan, dan nilai tambah produksi pangan, misalnya mie, ubi bubuk dan gula-gula. Harapannya adalah bahwa perusahaan tersebut akan di masa depan membantu meniadakan kebutuhan untuk terus siklus migrasi keluar (hal. 8).

Menurut Gibson - Graham, salah satu intervensi utama dari AMC dan UnladKabayan adalah untuk mengubah pandangan "buruh migran hanya sebagai korban tak berdaya dari globalisasi kapitalis, negara asal serakah dan eksploitatif dan negara tuan menghitung yang ternyata menutup mata untuk pelanggaran hak asasi manusia non-warga negara" lebih lanjut mengubah migran menjadi investor dalam usaha berbasis masyarakat dan kontributor pembangunan daerah dalam komunitas mereka sendiri, sebuah praktek yang jelas menentang globalisasi kapitalis dan bukannya menunjukkan pekerja migran sebagai pelaku aktif perubahan.

Merebut kembali pembangunan dan kesejahteraan

Deglobalisasi dan kedaulatan pangan saling melengkapi "meta-narasi" perlawanan dan perubahan yang menantang hegemoni "satu ukuran cocok untuk semua" Model pembangunan yang dipromosikan oleh kedua neoliberalisme dan usang birokrasi sosialisme negara. Mereka menginspirasi membayangkan ulang 'pembangunan' sebagai suatu proses yang berakar pada hak non-negotiable untuk menentukan nasib sendiri dari semua orang. Strategi pembangunan menentukan bagaimana sumber daya bangsa yang digunakan, bagaimana warganya dilindungi dan potensi mereka yang meningkat, dan bagaimana komunitas yang beragam dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu mereka harus memberikan

kontribusi positif bagi kesejahteraan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat daripada memperbudak mereka untuk formula gagal.

Penting untuk diingat bahwa orang-orang dan masyarakat tinggal, bekerja, diproduksi, dipertukarkan, diperdagangkan, dan dikonsumsi jauh sebelum WTO muncul. Alternatif untuk WTO dan kapitalisme global yang ada di seluruh dunia, tetapi sedang tertekan oleh gempuran ekonomi, keuangan, krisis lingkungan, dan sosial yang berulang. Sistem WTO menekan kemunculan dan perluasan kekuatan kreatif, sistem, dan proses yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman kita di benar-benar demokratis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dari planet kita. Di bawah WTO, perdagangan dan investasi tidak akan kendaraan untuk memperkuat kapasitas domestik dan mendorong kesejahteraan di negara berkembang, melainkan akan menguras sumber daya kami untuk memberi makan pasar di mana kita tidak memiliki kontrol.

Dalam rangka merebut kembali pembangunan, kesejahteraan, otonomi, dan kehidupan, kita harus menolak WTO.

- 1 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr00_e.htm
- 2 Jayati Ghosh. (2009) *This crisis of capitalism is not all bad news*. Transcript of speech broadcast by the Guardian and The Real News, London. <http://mrzine.monthlyreview.org/2009/ghosh300309.html>
- 3 http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_13_EN.pdf
- 4 http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_13_EN.pdf
- 5 *Capitalism's Last Stand? Deglobalisation in the Age of Austerity*. Walden Bello. Zed Books 2013. hal. 272
- 6 *Capitalism's Last Stand? Deglobalisation in the Age of Austerity*. Walden Bello. Zed Books 2013. hal. 272-275
- 7 J.K. Gibson-Graham, *Surplus Possibilities: Post-development and Community Economies*, Department of Human Geography, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, Canberra, Australia and Department of Geosciences, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA.

Apa yang bisa Kita Lakukan untuk MENGHENTIKAN WTO?

E

ENGAGE / LIBATKAN pemerintah kita dalam debat publik tentang organisasi perdagangan dunia (WTO) dan perdagangan bebas. Tuntut suatu penilaian nasional tentang keanggotaan negara kita di WTO dan peninjauan perdagangan bebas dan perjanjian investasi bilateral.

EDUCATE / DIDIK masyarakat tentang sejarah WTO dan Negosiasi Putaran Doha, dengan menyoroti rekor WTO dalam mengikis kedaulatan nasional, perusakan lingkungan dan pelembahan hak rakyat.



N

Bangun **NETWORK / JARINGAN** dan aliansi antar gerakan-gerakan yang berbeda dan berkampanye untuk melawan dan menantang WTO dan rezim perdagangan bebas dan bekerja sama untuk membangun sistem-sistem alternatif.

Tanda tangan seruan aksi GERAK LAWAN untuk mengakhiri WTO
<http://smaa.asia/action-plan-and-roadmap-to-bali/>

D

DEMONSTRATE / TUNJUKKAN penolakanmu terhadap WTO dan FTA dengan mengorganisir aksi dan mobilisasi di tempat Anda pada Hari Aksi Global Menentang WTO pada tanggal 3 Desember 2013.

Kirimkan sebuah **DELEGASI** ke Bali untuk berpartisipasi dalam aksi-aksi di dalam maupun di luar WTO.



W

WORK / KERJALAH untuk mendukung alternatif-alternatif dari WTO dan Rezim Perdagangan Bebas. Perkuat hubungan antar rakyat dan lintas gerakan untuk membangun sebuah sistem perdagangan yang mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara lingkungan.

WORK / KERJALAH dengan anggota parlemen yang progresif untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan dan hukum-hukum yang mempromosikan keadilan ekonomi dan memperkuat hak-hak dan kesejahteraan dan keadilan ekonomi rakyat.

T

Tuntut **TRANSPARANSI** dan dorong demokratisasi pembuatan kebijakan perdagangan dan investasi. Maksimalkan dan perjuangkan ruang-ruang yang tersedia untuk keikutsertaan rakyat dalam tata ekonomi. Tuntut undang-undang kebebasan informasi. Tantang kekuasaan TNC. Dorong pengaturan investasi yang lebih kuat dan mekanisme untuk menuntut akuntabilitas perusahaan.



O

ORGANISIR dan perkuat terus jaringan-jaringan dan platform-platform rakyat untuk menolak WTO dan FTA.

Membuat **PETISI ONLINE**. Sebar luaskan. Maksimalkan kekuatan media sosial untuk menjangkau yang lain dan menekan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia.



Focus on the Global South didirikan pada tahun 1995 untuk menantang neoliberalisme, militerisme dan globalisasi yang digerakan oleh korporasi sambil menguatkan alternatif yang adil dan merata.

Kami bekerja dalam solidaritas bersama Global South—sebagian besar umat manusia yang tepinggirkan dan terbuang oleh globalisasi—percaya bahwa perubahan sosial yang progresif dan solidaritas Global South sangatlah penting jika kebutuhan dan aspirasi rakyat ingin terpenuhi, khususnya di Asia, Amerika Latin dan Afrika.

focusweb.org

Didukung oleh

